

**MODAL SOSIAL
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK**

Siti Irene Astuti Dwiningrum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidanakan dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MODAL SOSIAL
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK**

Siti Irene Astuti Dwiningrum

 **UIN
PRESS**
2014

**MODAL SOSIAL
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK**

Oleh:
Siti Irene Astuti Dwiningrum
ISBN: 978-602-7981-37-9
Edisi Pertama

Diterbitkan dan dicetak oleh:
UNY Press
Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp: 0274 - 589346
Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com
© 2014 Siti Irene Astuti Dwiningrum

Penyunting Bahasa: Teguh Setiawan
Desain sampul: Deni S.
Tata Letak: Yudi Rahman

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Siti Irene Astuti Dwiningrum
**MODAL SOSIAL
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK**
-Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2014
xviii+ 354 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-602-7981-37-9
*1. modal sosial
dalam pengembangan pendidikan
dalam perspektif teori dan praktik*

1 judul

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Buku Tentang Modal Sosial Dalam Pengembangan Pendidikan Dalam Perspektif Teori Dan Praktik.Dapat Diselesaikan Sesuai Dengan Rencana. Dalam Kesempatan Ide Penulis Mengucapkan Terima Kasih Kepada Prof. Suyata, Ph.D Yang Telah Memberikan Kepercayaan Untuk Menjadi Asisten Beliau Dalam Matakuliah Teori Persekolahan Progam S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Dan Juga Sebagai Reviewer Buku Ini. Kepercayaan Beliau Dan Kesempatan Belajar Bersama Sebagai Asisten Telah Mendorong Penulis Untuk Mengembangkan Ide Dan Gagasan Beliau Dalam Beberapa tulisan dan riset yang kemudian dikemas dalam buku ini. Demikian juga kepada Prof. Dr. Sodik A.Kuntoro yang memotivasi penulis untuk menulis buku dan memperkuat kemampuan peneliti untuk berpikir kritis dan humanis dalam memahami fenomena sosial, khususnya terkait dengan praktik pendidikan di Indonesia. Secara khusus, kepada Prof. Zamroni, Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih untuk menjadi asisten dalam matakuliah Pendidikan Multikultural dan Hakikat IPS yang menambah wawasan yang luas dan kritis serta belajar tentang bagaimana menjadi penulis buku melalui karya produktifnya.

Materi dalam buku belum sempurna, bahkan masih terbatas pada gagasan dan kajian awal yang sangat membu-tuhkan kajian dan telaah kritis bagi pengembangan modal sosial sebagai aspek penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Modal sosial harus dikembangkan secara kontekstual dalam berbagai riset dan dikembangkan secara teoritis untuk mengembangkan teori modal sosial berbasis riset di Indonesia. Hal ini didasarkan pada realitas sosial bahwa modal sosial dalam masyarakat semakin melemah, padahal modal sosial dinilai sebagai modal strategis untuk menggerakkan berbagai modal lain dalam kehidupan manusia, seperti halnya modal intelektual, modal budaya, modal ekonomi.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambahkan referensi bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang tertarik dengan kajian tentang modal sosial dan modal budaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada mahasiswa S1, S2 dan S3 yang

PENDAHULUAN

memberikan inspirasi pada penulis dan telah membantu penulis untuk berdiskusi tentang kajian buku dan penelitian modal sosial pada saat kuliah. Beberapa hasil diskusi juga menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk menuliskan beberapa ide dalam buku ini. Kepada teman-teman dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dengan tema modal sosial, peneliti mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga bagian dari data penelitian dijadikan sebagai bahan materi untuk penulisan buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya pada Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan kesempatan pada dosen untuk terus berkarya menulis buku, khususnya dalam Program Buku Dies Natalis ke 50 Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga buku ini merupakan salah satu buku yang memberikan kontribusi pada UNY sebagai pusat pendidikan dan sumber informasi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Sebagai ide awal buku ini masih membutuhkan masukan dan kritikan untuk lebih baik. Penulis berbahagia dan berterima kepada para pembaca yang memberikan gagasan bagi perbaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat terima kasih.

Yogyakarta, 8 September 2014

Penulis
Siti Irene Astuti Dwiningrum

Peran modal sosial semakin melemah di tengah-tengah kebutuhan untuk memajukan kualitas pendidikan yang dihadapkan pada masalah yang multidimensional. Modal sosial belum dipertimbangkan sebagai modal penting dalam menggerakkan warga masyarakat untuk memperbaiki tujuan pendidikan lebih optimal. Pembangunan pendidikan terbukti tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kekuatan modal sosial. Modal ekonomi akan berkembang tanpa makna jika tidak dikuatkan dengan kekuatan modal sosial dan modal budaya.

Buku ini dirancang dalam tiga kelompok bahasan. Bagian pertama, membahas tentang Modal Sosial dalam Perspektif Teori Sosial, yang terdiri dari tiga bab yakni : Bab 1 Modal Sosial dalam Perspektif Teoritik, yang akan membahas beberapa pokok pikiran tentang modal sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert D. Putnam, Francis Fukuyama, Ronald R. Burt dan Nan Lin. James Coleman menyatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mendukung tindakan-tindakan para aktor yang merupakan anggota dari struktur itu. Modal sosial adalah beberapa aspek dari struktur sosial yang mendukung tindakan pelaku yang menyoroti tingkat tinggi modal sosial terutama manfaat perkembangan anak. Modal sosial sebagai seperangkat sumber daya yang menjadi sifat dalam hubungan keluarga dan organisasi sosial komunitas yang berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial seorang anak dan remaja. Pierre Bourdieu mengatakan bahwa modal sosial diartikan sekelompok sumber-sumber aktual atau potensial yang berhubungan dengan kepemilikan suatu jaringan yang bertahan dari hubungan-hubungan yang kurang atau lebih melembaga dari saling mengetahui atau menghargai. Robert D. Putnam mengatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan. Modal sosial, sebagaimana bentuk modal lainnya, adalah produktif dan memfasilitasi pencapaian tujuan tertentu yang tidak akan mungkin dalam keberadaannya. Francis Fukuyama mengatakan bahwa modal sosial merupakan kemampuan orang-orang bekerja bersama-sama untuk tujuan-tujuan umum di dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai keadaan seperangkat nilai-nilai atau

norma-norma informal bersama yang saling digunakan di antara anggota-anggota kelompok yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Ronald R. Burt mengatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan. Nan Lin mengatakan bahwa modal sosial sebagai investasi dalam hubungan sosial dengan pengembalian yang diharapkan di pasar. Untuk menghasilkan keuntungan, individu berinteraksi dan saling jaringan. Jaringan muncul sumber daya yang penting khusus untuk produksi manfaat menanamkan. Modal sosial merupakan semua sumber daya tertanam dalam struktur sosial yang diakses dan/atau dimobilisasi dalam tindakan purposif. Definisi ini mencakup tiga aspek modal sosial; sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial (melekatnya), mereka diakses oleh individu (aksesibilitas) dan individu menggunakan atau memobilisasi mereka dalam tindakan secara purposif (penggunaan).

Bab II Analisis Hubungan Antar Komponen Dalam Modal Sosial, konsep tentang modal sosial terus dikaji secara teori maupun praktik. Pengembangan konsep analisis modal sosial terus dilakukan oleh para ahli, sedangkan penelitian-penelitian tentang modal sosial terus berkembang dan menghasilkan berbagai temuan-temuan yang memperkuat eksistensi penggunaan modal sosial sebagai usaha memperbaiki pemahaman individu dalam kehidupan sosial. Pada bab ini akan dipaparkan konsep-konsep pokok modal dasar yang diuraikan oleh Tom Schuller (2004) dalam bukunya *The Benefits of Learning, The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital.* " dari Yulia Hauberer (2011) yang akan mengkaji lebih khusus tentang peran modal sosial dalam proses belajar. Proses belajar merupakan aktivitas sosial cukup kompleks, hasil belajar tidak sekedar diukur dari hasil lulus ujian akan tetapi perlu dikaitkan dengan kesehatan, kehidupan keluarga dan modal sosial. Eksistensi modal sosial dalam dinamika kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Individu tidak hanya dipahami secara parsial, tetapi proses pertumbuhan dan perkembangan individu ditentukan oleh dinamika kepemilikan modal yang melekat dalam kehidupan sosialnya.

Bab III Motivasi dan Interaksi dalam Modal Sosial akan membahas tentang modal sosial tidak dapat dipisahkan dengan konsep motivasi. Motivasi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika perilaku manusia. Demikian halnya, interaksi sosial merupakan prasyarat penting dalam

membangunan dinamika sosial. Semua aktivitas sosial dapat berjalan dan bergerak jika ada proses interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen yang terkait dengan modal sosial dibahas secara lebih fokus oleh Nan Lin, Dalam bukunya *Social Capital, khususnya pada bab 4 yang membahas tentang " Resources, Motivations, and Interaction.* Nan Lin menjelaskan tentang konsep modal sosial dalam kaitannya dengan berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut Nan Lin, modal sosial berakar dalam jaringan sosial dan hubungan sosial serta dipahami sebagai sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial yang diakses dan / atau dimobilisasi dalam tindakan yang bertujuan. Dengan demikian dipahami, modal sosial mengandung tiga komponen antara lain struktur, kesempatan (aksesibilitas melalui jaringan sosial), dan tindakan.

Pada bagian kedua akan mengkaji tentang Modal Sosial dalam Perspektif Sosial-Budaya yang terdiri dari tiga bab. Pada bab IV tentang Modal Sosial dalam Kebijakan Pendidikan Desentralistik akan dipaparkan secara singkat tentang pentingnya dukungan modal sosial dalam penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa desentralisasi pendidikan mengubah struktur kewenangan dalam tatanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pada satuan pendidikan dalam melakukan proses interaksi sosial sebagai dasar bagi semua bentuk kegiatan manusia. Desentralisasi pendidikan juga telah mengubah berbagai peran-peran penting dalam proses pengelolaan pendidikan. Dialektika terjadi dalam proses perubahan kebijakan pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang karena akan mengubah sikap partisipatif rakyat dalam pengelolaan pendidikan, tetapi di sisi lain terjadi fenomena melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Bab V Modal Sosial Dalam Kearifan Lokal. Bab ini memaparkan tentang pentingnya peran modal sosial dalam menguatkan eksistensi kearifan lokal yang mulai melemah dalam tantangan budaya global. Kearifan lokal perlu digali kembali untuk membangun "cultural identity". Kearifan lokal sebagai modal sosial bangsa. Kearifan lokal sebagai modal untuk pendidikan karakter harus dikembangkan dengan pendekatan yang holistik dan

kontekstual. Sekolah memiliki peran strategis untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial bagi pendidikan karakter.

Bab VI Modal Sosial dan Akuntabilitas Sekolah. Modal sosial diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat membutuhkan modal sosial dalam proses pengelolaan pendidikan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam menerapkan akuntabilitasnya. Isu akuntabilitas mulai berkembang karena masyarakat mulai mempertanyakan pendidikan yang berkualitas, keadilan dalam pendidikan, efisiensi dalam pengelolaan pendidikan.

Bagian Ketiga tentang Modal Sosial dalam Kajian Penelitian yang akan memaparkan lima kajian hasil penelitian. Bab VII Modal Sosial dan Pengembangan Pendidikan akan membahas hasil penelitian yang terkait dengan pembangunan dapat berjalan dengan optimal jika didukung dengan memanfaatkan modal sosial. Namun demikian modal sosial bahkan belum dinilai sebagai aspek penting dalam memba-ngun dinamika masyarakat. Padahal modal sosial terbukti mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan, sebagai energi sosial yang dapat mendorong keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan. Hasil riset yang dipaparkan dalam salah satu bab pada buku "*The Role of Social Capital in Developmental An Empirical Assessment*", khususnya tentang *The Creation and Transformation of Social Capital* yang ditulis oleh Grootaert, Christiaan and Thierry van Bastelaer tahun 2002. Grootaert memberikan gambaran empirik tentang peran modal sosial dalam proses pembangunan. Hasil riset Grootaert membuktikan bahwa proses pembangunan tak cukup dengan modal ekonomi, akan tetapi efektivitas pengembangan modal sosial menjadi kajian sosiologis yang dalam aplikasinya tak lepas dari berbagai kepentingan politik-ekonomi. Dengan memahami hasil riset tersebut dapat menjadi sumber informasi bagi Indonesia dalam menggunakan modal sosial dalam proyek pembangunan pendidikan.

Bab VIII Modal Sosial pada Sekolah Dasar yang membahas bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Pemetaan modal sosial di sekolah diperlukan untuk memahami kekuatan modal sosial. Pada bab ini akan dipaparkan modal sosial di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan Siti Irene Astuti Dwiningrum bersama dengan Suyata, Sodik A. Kuntoro, diharapkan memberikan

gambaran empirik tentang modal sosial yang sudah dimiliki oleh sekolah.

Bab IX Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu akan memaparkan analisis data kualitatif tentang modal sosial dalam proses perbaikan mutu. Modal sosial diperlukan bagi perbaikan mutu sekolah. Modal sosial akan optimal jika sekolah menciptakan kondisi yang mampu mengembangkan sumber daya pribadi menjadi sumber daya sosial. Penguatan modal sosial diperlukan agar siswa mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dalam mengembangkan menjadi sumber daya sosial. Penguatan modal sosial dengan mengembangkan fungsi pada unsur-unsur modal sosial antara lain adalah unsur (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

Bab X Modal Sosial dalam Pendidikan Karakter akan memaparkan sebagian dari data penelitian Siti Irene Astuti Dwiningrum dan Rukiyati tentang pengembangan modal sosial dalam pendidikan karakter bangsa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa modal sosial berperan dalam proses pendidikan karakter dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang secara sinergis dapat dikuatkan untuk mengatasi krisis karakter bangsa. Hasil penelitian diharapkan memberikan ide awal tentang bagaimana cara yang efektif untuk menggunakan modal sosial dalam pendidikan karakter bangsa.

Bab XI Modal Sosial dan Resiliensi Sekolah akan memaparkan bagian penelitian Siti Irene Astuti Dwiningrum dan Rani Wedowati yang meneliti tentang kebijakan *regrouping* dan resiliensi sekolah serta peran modal sosial dalam pengembangan mutu pendidikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses kebijakan *regrouping* sekolah membutuhkan modal sosial dalam menguatkan resiliensi sekolah. Modal sosial bermanfaat bagi pengembangan progam sekolah pascara erupsi Merapi. Penelitian memberikan gambaran awal tentang pentingnya menguatkan modal sosial dalam menghadapi dampak bencana dalam bidang pendidikan.

Untuk memberikan contoh yang aplikatif tentang cara mengukur modal sosial, pada Bab XII tentang Pengukuran Modal

Sosial akan dipaparkan contoh pengukuran modal sosial yang dikembangkan oleh *World Bank*. Instrumen pengukuran modal sosial dapat digunakan untuk memetakan modal sosial di Indonesia, namun demikian dalam penggunaannya masih diperlukan pencermatan dan modifikasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Uraian buku edisi pertama masih belum sempurna, karena secara teoritik masih diperlukan dialog kritik dari berbagai teori-teori baru yang mulai berkembang. Demikian halnya, hasil penelitian masih perlu dikembangkan dalam konteks makro dan mikro terhadap berbagai persoalan pendidikan dari perspektif modal sosial. Oleh karena itu, penulis berharap dapat buku ini terus dikembangkan sebagai kajian empirik tentang modal sosial. Kajian modal sosial masih banyak sekali yang secara khusus dan fokus mengkaji masalah modalsosial dengan pembangunan pendidikan, yang sampai hari ini masih menghadapi masalah kesenjangan mutu sosial dan kesempatan pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENDAHULUAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I KONSEP MODAL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORETIS	1
A. Modal Sosial menurut Pierre Bourdieu	2
B. Modal Sosial menurut James Coleman	7
C. Modal Sosial menurut Robert D. Putnam	10
D. Modal Sosial menurut Francis Fukuyuma	18
E. Modal Sosial menurut Ronald Burt	20
F. Modal Sosial Menurut Nan-Lin	23
G. Kritik terhadap Modal Sosial	30
BAB II ANALISIS HUBUNGAN ANTARKOMPONEN DASAR MODAL SOSIAL	34
A. Modal Manusia	37
B. Modal Sosial	38
C. Modal Identitas	42
D. Segitiga Berhubungan: Dinamika Hubungan Modal Manusia, Modal Identitas dan Modal Sosial	44
BAB III MOTIVASI DAN INTERAKSI DALAM MODAL SOSIAL	47
A. Sumber Daya Pribadi	48
B. Sumber Daya Sosial sebagai Modal Sosial	49
C. Motif Sumber Daya: Tindakan Bertujuan	53
D. Interaksi <i>Homophilous</i> dan <i>Heterophilous</i>	55
E. Aksi Memandu Interaksi	57
F. Kendala Struktural dan Peluang dalam Kapitalisasi	60

BAB IV MODAL SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DESENTRALISTIK	66
A. Perubahan Kebijakan Pendidikan	67
B. Desentralisasi Pendidikan	72
C. Modal Sosial dalam Kebijakan Pendidikan	79
BAB V MODAL SOSIAL DALAM KEARIFAN LOKAL	88
A. Makna dan Dimensi Kearifan Lokal	90
B. Kearifan Lokal dalam Tantangan Global	93
C. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial	98
D. Kearifan Lokal dan Pendidikan Karakter	103
E. Peran Pemimpin dan Revitalisasi Kearifan Lokal.....	109
BAB VI MODAL SOSIAL DAN AKUNTABILITAS SEKOLAH	114
A. Modal Sosial dan Konsep Dasar Akuntabilitas	117
B. Motivasi Akuntabilitas	123
C. Akuntabilitas dan Mutu Pendidikan	126
D. Akuntabilitas dan Manajemen Pendidikan	131
E. Akuntabilitas dan Pembelajaran di Kelas	136
F. Pengembangan Akuntabilitas Sekolah	138
BAB VII MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	144
A. Buku Pelajaran dan Sekolah Program Hibah	147
B. Program Kelompok Perempuan	154
BAB VIII MODAL SOSIAL PADA SEKOLAH DASAR	162
A. Modal Sosial dalam Perkembangannya	165
B. Modal Sosial di Sekolah	168
C. Modal Sosial Perbaikan Kualitas Sekolah	173
D. Pemetaan Modal Sosial di Sekolah	176
E. Unsur Modal Sosial di Sekolah	199
BAB IX MODAL SOSIAL DALAM PERBAIKAN MUTU	210
A. Modal Sosial di Sekolah	212
B. Gerakan Sekolah yang Bermutu	216
C. Mutu Pendidikan	221
D. Pengembangan Modal Sosial di Sekolah	228

BAB X MODAL SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA	232
A. Krisis Karakter Bangsa	242
B. Pemetaan Modal Sosial di Masyarakat	244
C. Modal Sosial Perspektif Masyarakat	247
D. Karakter dalam Masyarakat	250
E. Pengembangan Modal Sosial bagi Pendidikan Karakter	257
BAB XI MODAL SOSIAL DAN RESILIENSI SEKOLAH	262
A. <i>Regrouping</i> Sekolah	266
B. Resiliensi Sekolah	268
C. Modal Sosial	274
D. Kebijakan <i>Regrouping</i> dan Resilensi Sekolah	279
E. Resilensi Sekolah dan Modal Sosial	282
F. Manfaat <i>Regrouping</i> untuk Pengembangan Program Sekolah	283
BAB XII PENGUKURAN MODAL SOSIAL	287
A. Pengukuran Modal Sosial	288
B. Instrumen Pengukuran Modal Sosial	295
DAFTAR PUSTAKA	328
GLOSARIUM	342
INDEX	353

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jenis Modal Sosial	15
Tabel 1.2.	Indikator Modal Sosial	17
Tabel 5.1.	Peran Keluarga-Sekolah-Masyarakat dalam Melestarikan Kearifan Lokal	101
Tabel 5.2.	Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter	108
Tabel 8.1.	Keuntungan Utama Bagi Sekolah Bergabung dengan Organisasi	177
Tabel 8.2.	Layanan Sekolah	179
Tabel 8.3.	Latar Belakang Sosial-Ekonomi Siswa di Sekolah	180
Tabel 8.4.	Keputusan Sekolah	181
Tabel 8.5.	Pemilihan Kepala Sekolah.....	182
Tabel 8.6.	Keefektifan Pemimpin Sekolah	183
Tabel 8.7.	Interaksi Sekolah dengan Sekolah Lain yang Memiliki Tujuan yang Sama di Dalam Masyarakat/ Desa	183
Tabel 8.8.	Interaksi Sekolah dengan Sekolah Lain yang Memiliki Tujuan yang Sama di Luar Masyarakat/ Desa	184
Tabel 8.9.	Interaksi Sekolah dengan Sekolah Lain yang Memiliki Tujuan yang Berbeda di Dalam Masyarakat/Desa	185
Tabel 8.10.	Sumber Utama Pendanaan Sekolah	185
Tabel 8.11.	Sumber Keahlian Atau Saran Yang Paling Penting Diterima Sekolah	186
Tabel 8.12.	Tingkatan Keseringan Menonton Televisi	187
Tabel 8.13.	Sumber Informasi Utama tentang Apa yang Dilakukan Pemerintah	187
Tabel 8.14.	Akses Mendapatkan Informasi dengan Perbandingan Waktu 5 Tahun yang Lalu	188
Tabel 8.15.	Rasa Kebersamaan & Keakraban Warga Sekolah	189
Tabel 8.16.	Perbedaan Karakter	190
Tabel 8.17.	Perbedaan-Perbedaan Apakah Menimbulkan Masalah	190
Tabel 8.18.	Kecenderungan Perbedaan Apakah Menyebabkan Kekerasan	191
Tabel 8.19.	Latar Belakang Orang yang Ditemui	192
Tabel 8.20.	Lingkungan Sekolah	193

Tabel 8.21.	Tingkat Keamanan dari Tindakan Kriminal atau Kekerasan Apabila Sendirian di Sekolah	194
Tabel 8.22.	Tingkat Perasaan Bahagia	194
Tabel 8.23.	Kontrol yang Dilakukan dalam Membuat Keputusan yang Berpengaruh pada Kegiatan Sehari-hari	195
Tabel 8.24.	Kekuatan untuk Membuat Keputusan Penting yang Mengubah Hidup	196
Tabel 8.25.	Hal-Hal yang Dilakukan dalam 12 Bulan Terakhir.....	198
Tabel 8.26.	Unsur Modal Sosial di Sekolah	206
Tabel 9.1.	Indikator Peningkatan Mutu Sekolah	227
Tabel 9.2.	Modal Pengembangan <i>School Performance</i>	230
Tabel 10.1.	Peran Modal Sosial dalam Pendidikan Karakter.....	240
Tabel 10.2.	Unsur Modal Sosial pada Masyarakat	246
Tabel 10.3.	Pengertian Modal Sosial	247
Tabel 10.4.	Modal Sosial yang Dimiliki Warga Masyarakat	248
Tabel 10.5.	Modal Sosial yang Dimiliki Masyarakat	249
Tabel 10.6.	Ciri Orang yang Berkarakter	251
Tabel 10.7.	Bentuk Krisis Karakter Bangsa	252
Tabel 10.8.	Penyebab Krisis Karakter Bangsa.....	253
Tabel 10.9.	Nilai Karakter yang Dimiliki Warga Masyarakat	254
Tabel 10.10.	Problem Menjadi Orang Berkarakter	255
Tabel 10.11.	Peran Warga Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Bangsa	256
Tabel 11.1.	Resiliensi Sekolah	281
Tabel 11.2.	Resiliensi dan Modal Sosial	282
Tabel 11.3.	Manfaat <i>Regrouping</i> Sekolah Pasca Erupsi Merapi	283

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Causal Relationships of Elements of Putnam's Social Capital Concept</i>	24
Gambar 1.2.	<i>Interaction of the Components of the Structural Theory of Social Action</i>	25
Gambar 1.3.	<i>Lin's Social Capital Model</i>	25
Gambar 2.1.	Kerangka Konseptual	30
Gambar 6.1.	Konsep Dasar Membangun Akuntabilitas.....	99
Gambar 6.2.	Model Pengembangan Akuntabilitas Sekolah	112
Gambar 8.1.	Peran Modal Sekolah dalam Perbaikan Mutu Sekolah	143
Gambar 9.1.	Pola Pengembangan Modal Sosial.....	186
Gambar 9.2.	Modal Pengembangan <i>School Performance</i>	187
Gambar 11.1.	<i>The Resiliency Wheel</i>	220



BAB I

KONSEP MODAL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORETIS

Konsep modal sosial dibahas secara kritis dalam buku "*Social Capital Theory*" yang ditulis oleh Julia Hauberer. Beberapa konsep pokok akan dipaparkan dalam bab ini agar pemahaman tentang modal sosial dapat dipahami secara komprehensif. Julia Hauberer (2011), meletakkan dasar pemikiran yang cukup kuat bahwa konsep modal sosial tidak dapat dipahami secara parsial dan statis, karena dinamika konsep modal sosial terus berkembang seiring dengan proses perubahan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya seperti halnya sosial, ekonomi, budaya, politik. Dalam bab ini tulisan Hauberer akan dikaitkan dengan berbagai sumber referensi yang terkait dengan analisis kritis tentang modal sosial yang secara teoretis terus dikembangkan oleh para ahli.

Secara konseptual modal sosial telah banyak dikaji oleh para ilmuwan sosial. Beberapa buku yang mengkaji modal sosial sudah banyak dibaca dan dikritisi oleh berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, manajemen, politik, pendidikan, dan pekerjaan sosial (Gummer, 1998; Livermore & Neustom, 2003; Sherraden, 1991). Beberapa buku yang cukup dikenal dengan karyanya tentang modal sosial antara lain adalah buku karya Pierre Bourdieu (1983 dalam Hauberer, 2011) yang berjudul "*Le Capital Social: Notes Provisioires*", Robert D. Putnam (1993) "*The prosperous community: Social capital and public life*", Woolcock (1998 dalam Field, 2010), "*Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*", Nan Lin (2004) menulis "*Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*", dan John Field (2005) dengan karyanya berjudul "*Social Capital and Life Long Learning*". Hal ini membuktikan bahwa modal sosial merupakan kajian yang dinamis baik secara teoritis maupun aplikatif. Untuk

memahami konsep-konsep pokok yang sudah dikembangkan oleh para ahli, maka bab ini akan memaparkan konsep pokok tentang modal sosial agar dapat dipahami adanya persamaan dan perbedaan para ahli dalam mengkaji modal sosial. Beberapa pokok pemikiran yang dipaparkan pada bab ini antara lain adalah sebagai berikut.

A. Modal Sosial menurut Pierre Bourdieu

Bourdieu seorang sosiolog yang sangat bergaya Perancis, yang tertarik pada adanya kelas sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan⁰ di semua bidang. Pada awalnya, gagasannya menciptakan antropologi budaya reproduksi sosial tentang suku-suku di Aljazair selama tahun 1960-an. Bourdieu menggambarkan perkembangan dinamis struktur nilai dan cara berpikir yang membentuk apa yang disebut dengan 'habitus', yang menjadi jembatan antara agensi subjektif dengan objektif. Habitus adalah produk sejarah yang terbentuk sejak manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti yang luas. Pembelajaran terjadi secara halus, tak disadari dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu alamiah, seakan-akan terlebih oleh alam atau 'sudah dari sananya. Habitus mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan kontribusi terdiri pada realitas dunia. Oleh sebab itu, pengetahuan seseorang memiliki kekuasaan konstitutif (kemampuan menciptakan bentuk realitas dunia 'real'. Habitus tidak pernah 'tak berubah', baik melalui waktu untuk seorang individu, maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bourdieu beragurmen bahwa habitus berubah-ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang kompromi dengan kondisi-kondisi material (Harker, 1990:13-16).

Habitus adalah "struktur-struktur atau kognitif" melalui itu orang berurusan dengan dunia sosial. Orang dikarunia dengan serangkaian skema yang diinternalisasikan melalui itu mereka merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema-skema demikianlah orang menghasilkan praktik-praktik, merasakan, dan mengevaluasinya. Secara dialektis, habitus adalah produk internalisasi struktur-struktur dunia sosial (Ritzer, 2012:904). Habitus adalah produk sejarah, sesuai dengan skema praktik individu dan kolektif, dan karenanya sejarah, sesuai dengan

skema-skema oleh sejarah (Bourdieu, 1977:2 dalam Ritzer, 2012: 904).

Habitus merupakan kontruksi pengantara, bukan konstruksi pendeterminasi dan sebuah sifat yang tercipta karena kebutuhan, terutama dalam hubungannya dengan habitus kelas, dimana harapan-harapan dalam kaitannya dengan modal, secara erat diimbangi dengan berbagai kemungkinan objektif. Habitus secara erat dihubungkan dengan 'modal', karena sebagian besar habitus berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal yang pada kenyataannya membentuk sebetuk modal (simbolik) di dalam dan dari diri mereka sendiri (Harker, 1990:13-16).

Bagi Bourdieu, modal memiliki definisi yang sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik) yang memiliki signifikansi secara kultural, misalnya: pretise, status, dan modal budaya (Harker, 1990:13-16). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaraan, dan istilah ini diperluas 'pada segala bentuk barang baik material maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Bourdieu menegaskan bahwa kelompok mampu menggunakan simbol-simbol budaya sebagai tanda pembeda, yang menandai dan membangun posisi mereka dalam struktur sosial yang memperkuat pandangannya dengan menggunakan metafora modal budaya, yang menunjuk pada cara kelompok memanfaatkan fakta bahwa beberapa jenis selera budaya menikmati lebih banyak status daripada jenis selera budaya yang lain. Modal budaya yang dimiliki oleh orang bukan sekedar mencerminkan sumber daya modal finansial, tetapi dibangun oleh kondisi keluarga dan pendidikan di sekolah. Modal budaya pada batas-batas tertentu dapat beroperasi secara independen dan tekanan uang sebagai bagian dari strategi individu atau kelompok untuk meraih kesuksesan atau status (Field, 2010:21-22).

Dalam perkembangan pemikirannya, Bourdieu mengembangkan modal sosial sebagai catatan sementara yang dikembangkan gagasannya tentang reproduksi sosial dengan melakukan berbagai studi empirik monumental tentang budaya tinggi Prancis, dan

kritiknya yang digambarkan sebagai konformitas dan mediokritas sistem universitas Perancis. Hal yang menarik dalam diskusi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1973, pada awalnya ia mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberi 'dukungan-dukungan' bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin mencari para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam karier politik (Bourdieu, 1977:503 dalam Field, 2010:23). Kemudian Bourdieu memperbaiki pandangan dengan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual maya yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal-balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit terinstitusionalisasikan (Bourdieu dan Wacquant, 1992:119 dalam Field, 2010:23).

Bourdieu menyatakan bahwa istilah modal sosial adalah 'satu-satunya cara' untuk menjabarkan 'prinsip-prinsip aset sosial' yang menjadi kendala manakala individu yang berlainan memperoleh hasil yang sangat tidak setara dari modal yang kurang lebih ekuivalen (ekonomi atau budaya). Istilah modal yang digunakan oleh Bourdieu ditujukan untuk melakukan demistifikasi atas pandangan humanistik tentang hubungan-hubungan sosial, dengan memperhatikan bagaimana semua berfungsi sebagai strategi investasi. Ia memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyalahgunaan atau kesalahan pemanfaatan modal sosial, khususnya di antara mereka yang mungkin mempresentasikan modal sosial yang diinstitusionalkan. Dari dimensi normatif menurut teori Bourdieu, modal sosial secara umum berfungsi menutupi pencarian laba secara terang-terangan yang dilakukan oleh pemiliknya, dan dengan demikian hal tersebut tidak sejalan dengan masyarakat demokratis yang dipadukan dalam jurnalisme dan aktivitas politiknya (Field, 2010:26).

Konsep modal sosial menurut Bourdieu merupakan suatu upaya untuk membentuk agen sosial dalam habitus sebagai individu-individu yang mengkonstruksi dunai sekelilingnya. Bourdieu mengembangkan konsep modal sosial tidak sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai modal yang lain. Istilah modal diartikan sebagai akumulasi tenaga kerja yang ada dalam

bentuk materi atau pemasukan. Akumulasi tenaga kerja membutuhkan waktu, tetapi sependan dengan usaha karena modal menghasilkan keuntungan dan bahkan semakin tumbuh saat direproduksi. Dalam kehidupan masyarakat dikenal tiga jenis modal yakni modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial (Hauberer, 2011). Struktur distribusi berbagai jenis modal sesuai dengan struktur yang melekat pada dunia sosial atau bidang sosial. Modal yang mengembangkan efektivitas tertinggi dalam bidang tertentu tergantung pada daerah aplikasi masing-masing dan pada transformasi biaya yang muncul dalam proses konversi dari satu modal ke modal lainnya (Bourdieu, 1983 dalam Hauberer, 2011). Dalam aplikasinya kelompok-kelompok masyarakat di bidang sosial bertujuan memperbanyak diri (misalnya: pengusaha ingin mereproduksi kekayaan mereka dan akademisi ingin menyakinkan dominasi mereka dari budaya yang sah). Sebagai konsekuensinya, kelompok mengembangkan strategi untuk memperoleh barang-barang tertentu material atau simbolis.

Modal sosial yang dikembangkan oleh Bourdieu dikaitkan dengan jenis modal sosial yang berhubungan erat dengan bidang sosial yang berbeda yang pada gilirannya tempat untuk aktor praksis sosial (Schwingel, 1995 dalam Hauberer, 2011). Dalam hal ini modal sosial tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri bebas, karena modal sosial terkait dengan modal lainnya. Analisis Bourdieu tentang tiga jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial. *Pertama*, Modal ekonomi dapat dikonversi menjadi uang, atau dalam bentuk hak milik kelembagaan. Barang-barang atau layanan dapat diperoleh secara langsung melalui ekonomi, sedangkan lainnya dengan modal hubungan sosial atau modal komitmen sosial. Modal tipe ini sangat penting karena masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda yang mempunyai berbagai macam modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial. Sebagai gambarannya dalam kelompok akademik kelas atas mempunyai modal sosial yang tinggi tetapi mereka hanya memiliki modal ekonomi yang sedikit. Sebaliknya, pelaku bisnis memiliki modal ekonomi yang tinggi dengan modal budaya yang rendah. Distribusi struktur dari beberapa modal tersebut berhubungan dengan struktur yang melekat dalam kehidupan sosial. Dalam bidang sosial, berbagi macam modal sampai beberapa ragam jumlah dan mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Modal yang memiliki keefektifan tertentu dalam



BAB II

ANALISIS HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN DALAM MODAL SOSIAL

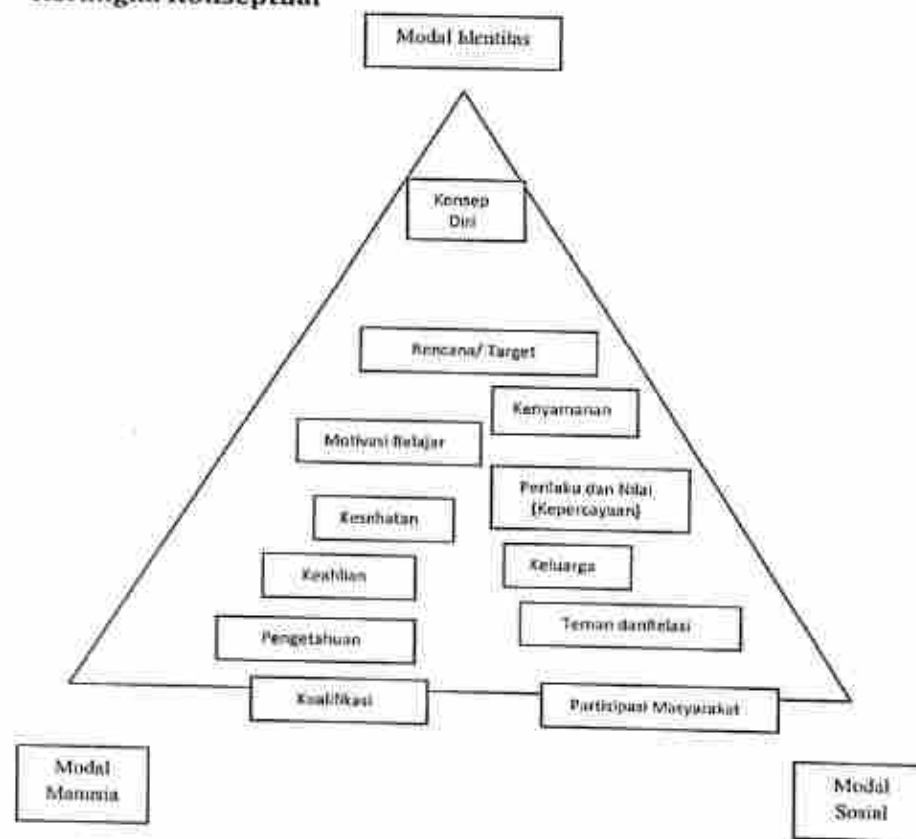
Konsep tentang modal sosial terus dikaji secara teori maupun empirik. Pengembangan konsep modal sosial terus dilakukan oleh para ahli, sedangkan penelitian-penelitian tentang modal sosial terus berkembang dan menghasilkan berbagai temuan yang memperkuat eksistensi modal sosial sebagai bagian yang terus melekat dalam kehidupan sosial. Pada bab ini akan dipaparkan konsep-konsep pokok modal sosial yang diuraikan oleh Tom Schuller (2004) dalam bukunya *"The Benefits of Learning, The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital"* yang akan dikembangkan dengan beberapa kajian modal sosial dari Julia Hauberer (2011). Beberapa pokok pikiran yang dipaparkan dalam bab ini akan mengkaji lebih khusus tentang peran modal sosial dalam proses belajar. Proses belajar merupakan aktivitas sosial cukup kompleks, hasil belajar tidak sekedar diukur dari hasil lulus ujian akan tetapi perlu dikaitkan dengan kesehatan, kehidupan keluarga dan modal sosial.

Dengan mempelajari materi bab ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan yang lebih komprehensif tentang eksistensi modal sosial dalam dinamika kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Individu tidak hanya dipahami secara parsial, tetapi proses pertumbuhan dan perkembangan individu ditentukan oleh dinamika kepemilikan modal yang melekat dalam kehidupan sosialnya. Proses belajar sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia harus dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Dalam konteks inilah eksistensi tentang modal sosial pun harus

dipahami dalam proses yang dinamis dengan modal-modal lain yang dimiliki oleh individu.

Kerangka konseptual yang dirancang oleh Tom Sculler menfokuskan pada tiga dimensi pokok yakni modal identitas, modal manusia, dan modal sosial, yang terlibat dalam proses untuk menganalisis hasil belajar. Interaksi antarmodal tersebut akan menggambarkan dinamika dalam kehidupan sosial. Secara sederhana gambaran tentang hubungan antar tiga dimensi pokok dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber: *The Benefits of Learning, The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital* dari Julia Hauberer, 2011

Segitiga tersebut mencakup sejumlah item yang menggambarkan adanya manfaat dari belajar yang secara langsung atau tidak langsung terkait dalam proses belajar. Dengan kerangka berpikir tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis pembelajaran sebagai proses yang membangun kesadaran orang tentang aset yang dimiliki dalam bentuk modal manusia, modal sosial dan modal identitas. Disamping itu, dengan memperhatikan hubungan tersebut akan memudahkan dalam melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan keuntungan dari pengembalian investasi, misalnya dalam bentuk kesehatan, jaringan sosial, dan kehidupan keluarga. Disamping itu, dengan memahami hubungan tersebut dapat memotivasi modal untuk tumbuh dan dimobilisasi dalam proses belajar sehingga modal tersebut dapat berkembang menjadi kemampuan yang melekat dalam pribadi siswa (Schuller, 2004).

Dinamika dari item di atas dapat digunakan untuk menganalisis kompleksitas dalam proses pembelajaran. Dalam setiap kegiatan belajar menggambarkan adanya perubahan perilaku. Dengan analisis item tersebut, problematik yang terkait dengan proses belajar cukup kompleks. Sebagai gambaran, dalam proses perkembangan anak yang merupakan fase awal perkembangan kehidupan, merupakan efek dari pendidikan keluarga, konteks sosial, yang dihasilkan dari pola-pola yang cukup kompleks dari berbagai faktor dalam proses interaksi sosial. Dalam hal ini, kerangka pikir dari Tom Schuller dapat digunakan untuk menganalisis interaksi antara hasil yang berbeda dalam proses belajar yang dialami oleh individu. Misalnya, kita dapat membuat beberapa penilaian tentang bagaimana harga diri dan partisipasi masyarakat saling terkait sebagai hasil bersama (2004).

Analisis tentang eksistensi modal yang dimiliki oleh individu tak dapat dipisahkan antara modal manusia, modal identitas, dan modal sosial. Dengan kata lain, ketika modal identitas berubah maka dimungkinan modal sosial pun akan berubah. Keterkaitan antar modal dapat dianalisis sebagai proses yang berkelanjutan, bertahap. Demikian halnya, item-item yang ada dalam dinamika proses menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk menguatkan modal yang dimiliki oleh individu yang secara

akumulatif dapat menguatkan kohesivitas sebagai energi kolektif. Sebagai contohnya, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membuat produk inovatif yang disebarkan pada warga kampung sekitarnya untuk mengikuti usaha yang sudah dirintisnya merupakan salah satu bentuk dari dinamika sosial yang diawali oleh kepercayaan masyarakat pada figur seseorang yang diakui mempunyai kapasitas sosial dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

A. Modal Manusia

Modal manusia mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu, yang memungkinkan mereka untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang berasal dari konsep Adam Smith karya kontemporer umumnya ditelusuri kembali ke karya ekonom Amerika di awal 1960-an (Schultz, 1961; Becker 1964). Konsep pokok dalam teori modal manusia adalah bahwa investasi dalam pendidikan menghasilkan kembali, kurang lebih dengan cara yang sama sebagai investasi tidak dalam modal fisik. Teori ini digunakan untuk menjelaskan variasi pada tingkat yang berbeda, terutama antara individu dengan berbagai tingkat kualifikasi, tetapi juga antara negara dengan saham yang berbeda dari modal manusia (lihat misalnya, - Lynch, 2002). Dari segi ekonomi fokus utama dalam analisis modal manusia telah menguntungkan pada tingkat individu, atau pada produktivitas atau pertumbuhan ekonomi di tingkat makro, namun juga telah digunakan untuk menganalisis banyak fokus yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan dan lain-lain. (lihat Grossman dan Kaesmer 1997; Gilleskie dan Harrison 1998 dalam Sculler, 2004).

Kapasitas modal manusia telah meningkat sangat besar selama beberapa dekade terakhir. Pengembangan akumulasi modal sosial membutuhkan analisis yang tepat. Perkembangan teknologi memungkinkan untuk mengukur dan menganalisa informasi dengan cara yang canggih. Sebagaimana dicontohkan bahwa data nasional maupun internasional yang menggambarkan untuk membuat populasi menurut sejumlah karakteristik sosial dapat dipaparkan. Namun demikian, dua pertanyaan tetap yakni pertama adalah salah satu dasar validitas, sejauh mana melakukan tindakan yang dapat menggali kualitas manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan prospek pasar kerja, meningkatkan kinerja dalam

Modal sosial adalah proses dinamis yang menggerakkan modal individu. Modal sosial dapat dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dari aspek-aspek yang dimiliki oleh individu. Dengan analisis hubungan pemahaman tentang modal sosial lebih bersifat holistik dan komprehensif. Dinamika proses belajar dalam perspektif modal sosial menggambarkan hubungan sosial yang sangat luas, karena banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus dipahami dalam dinamika struktur dan kultur yang dibangun oleh sekolah. Analisis hubungan dalam modal sosial memudahkan pendidik untuk memahami persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Demikian halnya, dengan menggunakan analisis hubungan akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang adanya perubahan hubungan sosial dalam di dalam memahami hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial.



BAB III



MOTIVASI DAN INTERAKSI DALAM MODAL SOSIAL

Kajian tentang modal sosial tidak dapat dipisahkan dengan konsep motivasi. Motivasi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika perilaku manusia. Demikian halnya, interaksi sosial merupakan prasyarat penting dalam membangun dinamika sosial. Semua aktivitas sosial dapat berjalan dan bergerak jika ada proses interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen yang terkait dengan modal sosial dibahas secara lebih fokus oleh Nan Lin, Dalam bukunya *Social Capital*, khususnya pada bab 4 yang membahas tentang "Resources, Motivations, and Interaction". Nan Lin menjelaskan tentang konsep modal sosial dalam kaitannya dengan berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut Nan Lin, modal sosial berakar dalam jaringan sosial dan hubungan sosial serta dipahami sebagai sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial yang diakses dan/atau dimobilisasi dalam tindakan yang bertujuan. Dengan demikian dipahami, modal sosial mengandung tiga komponen antara lain struktur, kesempatan (aksesibilitas melalui jaringan sosial), dan tindakan.

Pada bab ini akan dipaparkan aspek-aspek pokok yang terkait dengan modal sosial khususnya terkait peran sumber daya pribadi, sumber daya sosial, sumber motivasi dan interaksi sosial yang mendasari hubungan sosial dari kajian teoritis yang dikemukakan oleh Nan Lin.

A. Sumber Daya Pribadi

Dalam bahasanya Nan Lin mengawali dengan pepatahnya "Ini bukan hanya apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda tahu" menunjukkan bahwa modal sosial harus memberikan manfaat bagi seorang individu yang bertindak untuk suatu tujuan. Dalam konteks ini, interaksi dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tindakan. Tugas di sini adalah untuk memahami bagaimana tindakan terkait dengan interaksi dan bagaimana lembaga yang menonjol dalam proses memobilisasi modal sosial dalam tindakan yang bertujuan.

Tujuan individu, kelompok dan organisasi mendapatkan dan mempertahankan sumber daya berharga untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Mereka dapat memobilisasi dan menggunakan sumber daya seperti dalam tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kepemilikan atau akses ke sumber daya melindungi dan mempromosikan hereditas individu dalam struktur sosial. Pengakuan sosial menggambarkan identitas dan reputasi, yang menjadikan individu diakui memiliki sumber daya dan harga diri. Secara umum, dua jenis sumber daya dapat didefinisikan untuk aktor individu: sumber daya pribadi dan sumber daya sosial (Lin, 2004:41).

Menurut Nan Lin, sumber daya pribadi terkait dengan kepemilikan aktor individu, sebagai pemilik yang dapat digunakan, ditransfer, atau dibuang sebagai bagian dari otoritas dan tanggung jawabnya dalam kedudukan sosialnya. Akuisisi sumber daya pribadi dapat dikembangkan ataupun diwariskan dari orang tua, kerabat atau aktor lain. Dengan aturan kelembagaan masyarakat, mereka lulus dari satu aktor individu yang lain. Langkah lainnya untuk mengembangkan sumber daya pribadi dengan berinvestasi atau usaha mandiri. Pendidikan sebagai sumber daya yang diperoleh melalui investasi sumber daya orang tua atau pribadi dan usaha pribadi. Dalam hal ini, investasi dalam pendidikan juga menyebabkan akuisisi sumber daya berharga lainnya (misalnya, kekuasaan, kekayaan, dan reputasi) (2004:41).

Cara ketiga untuk memperoleh sumber daya pribadi adalah melalui pertukaran. Akuisisi sumber daya pribadi mungkin melibatkan pembayaran langsung (uang) atau pertukaran sumber daya (barter) melalui hal apa untuk sumber daya ditransfer dari satu

aktor individu ke yang lain. Hal ini dimungkinkan untuk menunda pembayaran atau pertukaran, dalam hal ini kredit pribadi atau utang yang timbul di kedua sisi, dengan harapan bahwa slip kredit (janji pembayaran masa depan) akan dihormati. Namun demikian, dalam pertukaran murni tidak ada kewajiban yang diharapkan diluar pembayaran utang itu sendiri dan tidak ada harapan pertukaran lebih lanjut. Properti pribadi, komoditas, uang, dan tenaga kerja adalah sumber daya khas dalam pertukaran tersebut.

Beberapa sumber daya pribadi sepenuhnya dimiliki oleh seorang aktor individu (misalnya, pendidikan, kekayaan) dalam arti bahwa aktor individu bebas untuk menggunakan dan membuang sumber daya tersebut. Lebih lanjut, sumber daya pribadi biasanya "dimiliki" terkait dengan oleh kontrak sosial, yang menunjuk seorang individu aktor untuk menjadi pengguna yang spesifik sumber-khas properti berhubungan dengan haknya (lihat Alchian 1965 dan Alchian dan Demsetz, 1973 untuk definisi hak milik). Selama kontrak ini berlaku, aktor individu dapat menjalankan kekuasaan dalam mengontrol sumber daya dan penggunaannya. Misalnya, penghuni posisi dalam struktur hirarki memiliki hak untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya yang melekat pada posisi itu. Hak-hak kepemilikan berakhir ketika aktor individu terlepas dari posisi itu. Oleh karena itu, berguna untuk membedakan sumber daya posisi dari sumber daya yang lebih pribadi yang dimiliki sepenuhnya (Lin, 2004:41-43).

Disamping itu, sumber daya memiliki posisi yang kurang permanen, mereka jauh lebih kuat sejauh sumber informasi lainnya yang mereka kontrol bersangkutan. Menjadi bagian dari struktur hirarki dengan kewenangan dan hubungan sosial akan menawarkan kesempatan untuk penghuni aktor-untuk memiliki akses ke aktor-penghuni lain dan meminjam atau pertukaran sumber daya. Dengan kata lain, melalui koneksi struktural, posisi dalam struktur hirarkis akan ada kontrol dan penggunaan sumber daya di luar mereka yang posisi tersebut dialokasikan. Dalam konteks inilah, eksplorasi sumber daya diakses melalui hubungan sosial, yaitu modal sosial.

B. Sumber Daya Sosial sebagai Modal Sosial

Sumber daya sosial merupakan modal sosial yang berkembang secara dinamis. Sebagaimana dijelaskan oleh Nan Lin bahwa tidak semua sumber daya yang tersedia untuk aktor individu

dalam kehidupan pribadi mereka miliki (termasuk kontrak). Bahkan, sumber daya pribadi untuk aktor individu yang sangat terbatas. Lebih mungkin, aktor individu mengakses sumber daya melalui hubungan sosial. Nan Lin, mendefinisikan sumber daya sosial, atau modal sosial, sebagai sumber daya dapat diakses melalui koneksi sosial. Modal sosial berisi sumber daya (misalnya, kekayaan, kekuasaan, dan reputasi, serta jaringan sosial) aktor individu lain dengan siapa aktor individu dapat mendapatkan akses melalui hubungan sosial yang langsung atau tidak langsung. Mereka adalah sumber daya tertanam dalam hubungan jaringan seseorang. Seperti sumber daya pribadi, sumber daya sosial dapat meliputi barang-barang material seperti tanah, rumah, mobil, uang, dan barang-barang simbolik seperti pendidikan, keanggotaan di klub, gelar kehormatan, bangsawan atau judul organisasi, nama keluarga, reputasi, atau popularitas.

Sumber daya seorang dapat dihubungkan dengan melalui jaringan sosial. Modal sosial dibutuhkan untuk mempromosikan status sosial seseorang. Dalam hal ini, utilitas simbolis terjadi karena informasi tersebut dipersalahkannya potensi kekuatan ego oleh asosiasi. Menyebarkan informasi tentang ego memiliki teman jutawan memberikan pengakuan sosial yang lebih baik untuk ego dalam dirinya atau lingkaran sosialnya karena potensi diduga ada untuk ego untuk mengaktifkan sambungan dan memanfaatkan sumber daya yang jika perlu.

Utilitas simbolik mencerminkan ego sosial atau budaya. Informasi tentang kenalan seseorang dengan bintang film mungkin tidak menyalahkan kuasa dalam tindakan, tetapi bisa meningkatkan pengakuan sosial ego karena menunjukkan bahwa ego, melalui interaksi dengan bintang film, bisa berbagi dan menikmati gaya hidup agar dilagumi dalam lingkaran sosial ego. Disamping itu utilitas simbolik menggambarkan sebuah ikatan seterusnya adalah seorang teman, "Saya berbicara begitu dan begitu juga kemarin" mungkin cukup untuk mempromosikan status sosial ego. Dalam kontes inilah, modal sosial dapat memberikan utilitas luar kekuatan simbolis.

Nan Lin menjelaskan, dua fitur penting dari modal sosial yang layak klarifikasi lebih lanjut: (1) sumber daya dapat diakses melalui hubungan langsung dan tidak langsung, dan (2) sumber daya seperti

mungkin dalam harta mengubah (sumber daya pribadi mereka) atau posisi sosial mereka (sumber daya posisi mereka). *Pertama*, modal sosial mencakup sumber daya diakses melalui hubungan langsung. Sumber Daya mengubah (hubungan langsung) mewakili porsi yang relatif kecil dari modal sosial ego. Sering modal sosial aktor mengaktifkan rantai ganda. Dalam rangka untuk mendapatkan akses ke sumber daya tertentu (misalnya, informasi tentang pekerjaan), ego dapat pergi ke seseorang yang tidak memiliki informasi itu, tetapi yang mungkin tahu orang lain yang tidak. Dalam hal ini, jaringan sosial kontak awal yang menjadi sumber daya bagi ego. Dengan demikian, modal sosial tidak datang hanya melalui koneksi langsung atau hubungan *dyadic* sederhana. *Kedua*, koneksi langsung dan tidak langsung mampu akses ke sumber daya. Melalui hubungan langsung dan tidak langsung mengubah, modal sosial aktor 'meluas sejauh sebagai jaringan sosial mereka. Artinya, modal sosial bergantung pada sumber daya yang tertanam dalam hubungan langsung dan tidak langsung dan dapat diakses melalui ikatan sosial (Lin, 2004:14).

Kedua sumber daya diakses melalui ikatan sosial mencakup kedua sumber daya tersebut mengubah kurang lebih permanen dan sumber daya yang mereka kontrol melalui posisi mereka dalam struktur hirarki, mengatakan organisasi-sumber daya mereka posisional. Secara umum, sumber daya posisi ikatan sosial yang jauh lebih berguna daripada sumber daya pribadi untuk ego, karena sumber daya posisi membangkitkan tidak hanya sumber daya yang tertanam dalam posisi di suatu organisasi, tetapi juga kekuasaan, kekayaan, dan reputasi organisasi itu sendiri. Dua profesor sama kompeten yang masing-masing berafiliasi dengan *Ivy League* universitas dan perguruan tinggi empat tahun negara, atau dua programmer profesional sama kompeten, salah satunya bekerja untuk Microsoft dan lainnya untuk sebuah perusahaan *software* kecil lokal, akan memiliki sumber daya cukup merata posisional, bahkan jika sumber daya pribadi mereka, termasuk pengetahuan dan pendapatan, adalah sama, karena sumber daya posisi dan pribadi rekan-rekan masing-masing mungkin berbeda dalam kualitas.

Pendapat Lin tersebut membuktikan bahwa kemampuan dalam membangun interaksi sosial menjadi aspek penting dalam membangun modal sosial. Interaksi sosial sebagai fondasi penting dalam proses sosial yang melandasi semua aktivitas kehidupan



BAB IV



MODAL SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DESENTRALISTIK

Pada bab ini akan dipaparkan secara singkat tentang pentingnya penggunaan modal sosial dalam penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik. Desentralisasi pendidikan telah mengubah struktur kewenangan dalam tatanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pada satuan pendidikan dalam melakukan proses interaksi sosial sebagai dasar bagi semua bentuk kegiatan manusia. Desentralisasi pendidikan telah mengubah berbagai peran-peran penting dalam proses pengelolaan pendidikan. Dialektika terjadi dalam proses perubahan kebijakan, proses desentralisasi pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang karena akan mengubah sikap partisipatif rakyat dalam pengelolaan pendidikan, tetapi di sisi lain terjadi fenomena melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Rekonstruksi dalam kebijakan pendidikan yang desentralistik masih berproses yang membutuhkan dukungan sosial. Dalam hal ini, modal sosial diperlukan untuk mempercepat tujuan desentralisasi pendidikan. Dengan modal sosial dapat mengubah sumber daya individu yang dimiliki oleh setiap sekolah atau masyarakat menjadi sumber daya sosial yang mampu menggerakkan dinamika dalam perbaikan kualitas pendidikan. Penguatan modal sosial perlu dilakukan secara komprehensif dalam keluarga, sekolah dan masyarakat dengan membangun kesadaran warga masyarakat

bahwa modal sosial dapat dikembangkan oleh semua stakeholder yang terlibat dalam proses pengelolaan pendidikan

A. Perubahan Kebijakan Pendidikan

Perubahan kebijakan pendidikan bersifat dinamis karena respon sekolah terhadap kebijakan pendidikan beragam. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan terkait dengan tindakan seseorang dari seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang berpola yang mengarah pada tindakan yang bertujuan tertentu dan memiliki makna dan bukan sekedar keputusan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhandji (1993:15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas azas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir, yaitu (1) tingkat hidup masyarakat meningkat; (2) terjadi keadilan; *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual; (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi); (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Dengan demikian, perubahan kebijakan pendidikan seharusnya bertujuan untuk mengatasi persoalan pendidikan yang dirancang secara strategis, bukan menimbulkan masalah baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho (2008:140) yang menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Rohman (2009:108) mengatakan kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Keputusan untuk mengubah kebijakan yang baru seharusnya dikaitkan dengan pemahaman konsep kebijakan yang pada intinya harus menjadi suatu regulasi baru yang mampu mengatur tindakan tertentu untuk lebih bermakna dan mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan.

Perubahan kebijakan pendidikan sentralistik ke desentralistik diharapkan dapat mengatasi kompleksitas masalah pendidikan di Indonesia. Permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. *Faktor pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini mengartikan lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) secara otomatis akan terjadi. Pendekatan ini gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan. *Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. *Faktor ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, *monitoring*, evaluasi, dan akuntabilitas) (Diknas, 2001:1). Oleh karena itu, permasalahan pendidikan perlu dikaji dalam perspektif sosiologis mengingat bahwa pendidikan tidak semata-mata sebagai "produk" tetapi sebagai "proses" yang menyangkut hasil interaksi sosial antar berbagai elemen-elemen dalam masyarakat.

Hal-hal yang menguatkan bahwa pendidikan adalah sebuah "proses" sebagaimana yang dipaparkan ILAR. Tiljar bahwa dalam perspektif mikro yang dijadikan pusat perhatian adalah peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dalam proses belajar berkaitan dengan tujuan pendidikan, metodologi, dan evaluasi hasil belajar. Semua masalah tersebut termasuk dalam sistem pendidikan di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh sistem internal, yaitu (1) pembuat kebijakan, (2) manajemen, dan (3) *service*.

Selanjutnya, keseluruhan sistem tersebut didukung oleh sistem eksternal, yaitu: (1) budaya, (2) kekuatan politik, dan (3) kondisi ekonomi. Kekuatan pandangan mikro ialah menempatkan peserta didik sebagai obyek utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Titik tolak adalah proses belajar mengajar yang kondusif agar tujuan dan visi pendidikan dapat diwujudkan sebagaimana yang diinginkan. Kelemahan pandangan mikro ialah seakan-akan proses pendidikan peserta didik akan menentukan segala-galanya atas suksesnya sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif ini sistem pendidikan sebagai pelaksana dari kekuasaan negara. (Tiljar, 2003:151).

Pendidikan sebagai "proses" dalam analisis makro dapat dipahami dalam perspektif studi sosio-kultural. Dalam konteks ini sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Dalam kaitan antar negara, pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Kekuatan dari perspektif ini adalah sistem pendidikan dapat mengubah gaya hidup suatu masyarakat karena dapat mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka dan reflektif. Pedagogik kritis merupakan pelopor dari pandangan yang menggunakan pandangan studi kultural. Peran negara dalam perspektif ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kontrol terhadap kekuasaan negara (Tiljar, 2003:151).

Perubahan kebijakan sentralistik dan desentralistik sebagai proses yang tak terelakkan, karena kegagalan dalam sentralisasi pendidikan yang dinilai kurang memberikan wacana bagi pengembangan dimensi demokrasi sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey dalam *School and Society*, yang menekankan pada inti pendidikan merupakan arena tumbuh dan berkembangnya gaya hidup demokrasi. Artinya, penyelenggaraan, manajemen, proses belajar-mengajar semuanya didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang meminta persiapan-persiapan yang matang dan kerja keras.

Dalam konteks pemikiran Dewey, gagasan akan perubahan kebijakan sentralistik ke desentralistik menggambarkan bahwa perubahan dari suatu sistem yang sentralistik dan otoriter menjadi suatu sistem demokratis yang terbuka tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, sumber daya manusia yang memadai, organisasi

yang demokratis, dan manajemen yang terbuka. Dalam masyarakat demokrasi, pendidikan adalah milik rakyat, dari, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata-mata milik pemerintah (pusat), tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut. Pada akhirnya, pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, rasa persatuan yang merupakan kapital sosial dari suatu masyarakat. Artinya, pembangunan suatu masyarakat hanya terjadi apabila masyarakat mempunyai kapital sosial yang besar dan bukan sekedar mempunyai dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang teratur dengan manajemennya yang terbuka. Semakin besar kapital sosial suatu masyarakat dalam menanggulangi kehidupan bersama, maka akan mempermudah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut (Jennifer dalam Tilaar, 2005:150-151).

Perubahan kebijakan pendidikan desentralistik erat dengan harapan perbaikan pembangunan pendidikan. Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini, bahkan slogan *knowledge is power* masih jauh dari realitas. Disamping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa *education for all* masih ada dalam tatanan konsep. Pendekatan sentralistik cenderung mematikan asas demokrasi (Tilaar, 1998). Lebih jauh lagi, sentralisasi pendidikan melenyapkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang gerak bagi masyarakat pendidik. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan massa yang kritis terhadap situasi pendidikan. Sebagai akibatnya, lembaga pendidikan kurang berperan sebagai ruang publik, bagi tumbuhnya demokrasi. Dampak yang lebih mendalam dari hegemoni pendidikan adalah terjadinya pengikisan pendidikan lokal dan pengikisan budaya-budaya lokal. Tak heran jika kemudian, masyarakat lokal mengalami anomie, alienasi, dan kehilangan identitasnya, serta kehilangan kebhinekaannya (Makmurt, 2003:5). Fenomena tersebut menjadi satu indikasi melemahnya modal sosial.

"Kegagalan pendidikan sentralistik diwarnai oleh kebijakan politik daripada kebijakan akademik. Pendidikan yang sentralistik menjadikan kinerja pendidikan cenderung memperlakukan peserta didik dan guru sebagai robot, *inhuman*, dan *impersonal*. Sebagai hasil akhirnya, beberapa lulusan tidak kreatif dan lemah kemadiriaannya setelah terjun di masyarakat dan di dunia kerja. Disamping itu,

praktek manajemen Sisdiknas membuat kuatnya jiwa birokrasi penyelenggara pendidikan yang dirasakan mulai dari pusat hingga ke tingkat mikro, yakni proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pada tingkat makro kinerja sekolah cenderung korporatis, dimana standar guru, kurikulum, fasilitas, dan prosedur proses pembelajaran ditentukan oleh kantor pusat (Sudarmawan, 2003:14)".

Modal sosial dibutuhkan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Ackerman dan Alscott pentingnya *the stakeholder society* yang diformulasikan secara sederhana, yakni sebagai masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakatnya sendiri. Terdapat lima pemain dalam *the stakeholder society*, yaitu: (1) masyarakat lokal; (2) orangtua; (3) peserta didik; (4) negara; (5) pengelola profesional pendidikan (Dwiyanto, 2005). Dinamika kerja dari *stakeholder* adalah bagian dari modal sosial yang akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program. Realitas sosial menunjukkan kecenderungan bahwa dunia pendidikan yang memiliki modal sosial belum dikembangkan secara optimal bagi perbaikan kualitas pendidikan. Bahkan ada kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, tidak dianggap penting oleh orangtua dan para pengelola pendidik. Fenomena ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat pendidik tentang peran modal sosial sebagai modal penting bagi perbaikan mutu pendidikan dan di pihak lain tidak dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, fungsi negara bukan lagi sebagai penguasa juga bukan sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang bertujuan melestarikan kekuasaan negara, tetapi sebagai *partner* yang memfasilitasi proses pendidikan yang disepakati bersama. Tugas negara antara lain membantu adanya standar nasional bahkan internasional dari lembaga-lembaga pendidikan dan membantu daerah-daerah lain yang kekurangan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan. Tapi di sisi lain, negara kadangkala mengabaikan tugas utamanya untuk memperjuangkan *education for all* dalam semua level sekolah dalam standar pendidikan yang sama.



BAB V

MODAL SOSIAL DALAM KEARIFAN LOKAL

Bab ini akan dipaparkan tentang pentingnya peran modal sosial dalam menguatkan eksistensi kearifan lokal yang mulai melemah dalam tantangan budaya global. Kearifan lokal perlu digali kembali untuk membangun "cultural identity". Kearifan lokal sebagai modal sosial bangsa. Kearifan lokal sebagai modal untuk pendidikan karakter harus dikembangkan dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Sekolah memiliki peran strategis untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial bagi pendidikan karakter.

Kearifan lokal merupakan modal sosial yang harus digali kembali dalam menghadapi tantangan budaya global. Bagi Indonesia yang memiliki ragam budaya dan ragam etnis memiliki kearifan lokal yang sesungguhnya menjadi modal bangsa untuk terus berkembang sebagai bangsa yang tetap kuat dalam menjalin hubungan-hubungan sosial yang dilandasi oleh kekuatan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sebagai modal sosial, kearifan lokal dapat dijadikan titik balik bagi sebuah bangsa, masyarakat setempat untuk menunjukkan identitas dan eksistensinya sebagai masyarakat yang dapat hidup dalam kebijaksanaannya. Bahkan, dengan kearifan lokalnya, masyarakat tidak akan pernah merasa menjadi masyarakat yang termarginalkan dalam era global, karena mereka tetap memiliki kekuatan nilai-nilai sosial budaya dan tradisi serta kebiasaan yang mencirikan "keunikan" yang melekat pada pribadi masyarakat setempat. Hal tersebut adalah penting, karena masyarakat yang merasa termarginalkan oleh proses perubahan, membuktikan kelemahan dan ketidakmampuan dalam beradaptasi sosial. Ketidakmampuan dalam beradaptasi sosial berakibat bahwa efek perubahan sosial-budaya yang terjadi di dalam masyarakat dapat

berdampak pada melemahnya sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga persoalan kehidupan sosial-budaya bahkan persoalan ekonomi, politik lebih kompleks jika kearifan lokal semakin hilang dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kearifan lokal diperlukan dalam proses pendidikan masyarakat. Bahkan dinilai mempunyai peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa sekolah belum menganggap penting bahwa kearifan lokal sebagai sumber pembangunan karakter bangsa. Demikian halnya, peran modal sosial masih belum dinilai sebagai aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Ada kecenderungan bahwa sekolah belum menyadari dan menganggap penting bahwa modal sosial adalah sangat strategis untuk dikembangkan dalam pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam proses belajar didalam keluarga maupun sekolah. Bahkan, ada kecenderungan bahwa warga masyarakat belum menyadari apa dan bagaimana modal sosial dikembangkan sebagai aspek penting dalam mempertahankan kearifan lokal? Fenomena yang menarik untuk dikritisi adalah adanya kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, bahkan mulai tidak dianggap penting oleh orangtua dan para pengelola pendidikan. Realitas ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat akan peran modal sosial dan kearifan lokal belum tidak dinilai sebagai modal penting bagi pendidikan karakter bangsa.

Kearifan lokal merupakan dua kata yang memiliki makna masing-masing berbeda yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hasan Syadily, lokal berarti setempat, sedangkan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diakui oleh anggota masyarakatnya. Pendapat lain dijelaskan oleh Alan Lingsgarja bahwa kearifan adalah kata sifat yang melekat pada karakter seseorang yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah kondisi sebuah tempat atau setempat. Akan tetapi, ketika digabungkan menjadi satu, kearifan lokal, maknanya sangatlah luas, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan nilai, kebiasaan, tradisi, baik budaya maupun agama yang menjadi aturan dan kesepakatan tempatan (*lokalitas*).

A. Makna dan Dimensi Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam konteks pengertian bahasa (Kartawinata, 2011: ix), dimaknai kearifan setempat (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Dalam konteks ini, masyarakat pendukung nilai-nilai elemen budaya dan diantaranya dapat dikategorikan sebagai "kearifan lokal" atau "*local wisdom*" atau "*local genius*" atau "*local knowledge*" dapat menjadi sumber nilai atau inspirasi bagi kemajuan masyarakat pendukungnya. Agar memberi arti penting bagi kehidupan dan kemajuan masyarakatnya, kearifan lokal tersebut harus dikembangkan dan dilaksanakan dalam masyarakat (Wahab, 2000:18), sedangkan menurut Kuntoro (2010), kearifan lokal digunakan untuk mengindikasikan adanya suatu konsep bahwa dalam kehidupan sosial budaya lokal terdapat keluhuran, ketinggian nilai-nilai, kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang dihargai oleh warga masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai panduan atau pedoman bagi membangun pola hubungan di antara warga atau sebagai dasar untuk membangun tujuan hidup mereka yang ingin direalisasikan (Habibuddin, 2014:80).

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi aspek kehidupan beragama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi serta kesenian, dapat berupa tradisi, pelata-petiti atau semboyan hidup. Sistem tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup yang mereka hadapi, berkat kerajinan lokal, mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (Alian, 2013:428, Habibuddin, 2014:78).

Kearifan lokal selalu berumbuh dari hidup manusia, ketika hidup itu berubah, kearifan lokal akan berubah pula. Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, dan komunikasi, serta kesenian. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi dalam masyarakat (Sudikan, 2013:2004, Habibuddin, 2014:79). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Battiste (2005:8) yang menyatakan bahwa:

"Indigenous knowledge thus embodies a web of relationship within a specific ecological context; contain linguistic categories, rules, and relationship unique to each knowledge system; has localized content and meaning; has established customs with respect to acquiring and sharing of knowledge; and implies responsibility for possessing various kinds of knowledge".

Kearifan lokal tak dapat dipisahkan dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup tak dapat dipisahkan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus bergerak dan berubah secara dinamis. Dinamika yang dibangun oleh masyarakat tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh kebudayaan masyarakat. Dalam hal inilah, keluhuran, ketinggian nilai-nilai, kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang dihargai oleh warga masyarakat tidak bisa dilepaskan dari budaya suatu daerah atau lebih dikenal dengan kebudayaan daerah akan mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Sidi Gazalba (1963:96) bahwa:

Kebudayaan daerah yang sering kita dengar sekarang adalah kebudayaan suku. Kebudayaan suku meliputi suatu daerah yaitu daerah kebudayaan. Batas kebudayaan menurut ruang diistilahkan dengan lingkaran kebudayaan. Lingkaran kebudayaan adalah ruang dimana terdapat atau hidup suatu corak kebudayaan, corak kebudayaan adalah kebudayaan dari suatu kesatuan sosial.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa kebudayaan daerah mempunyai peran penting dalam membentuk cara berpikir dan perilaku warga masyarakat. Dalam konteks inilah,

kebudayaan daerah atau nilai-nilai daerah sangat dekat dan erat, terciptanya pola-pola perilaku sebagai isi utama dari nilai-nilai budaya bermula dari pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak yang membentuk perilaku dan kemudian menjadi pola perilaku masyarakat adat setempat. Battiste (2005) menyampaikan: *"Indigenous knowledge has always existed. The recognition and intellectual activation of indigenous knowledge today is an act of empowerment by indigenous people..."*, hal ini membuat pemahaman setiap orang terhadap tata nilai yang hidup menjadi sangat penting.

Pemahaman orang tentang tata nilai yang dimiliki oleh masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal akan berpengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya (<http://alanlincarduna.blogspot.com/2012/01/>). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kearifan lokal pada dasarnya ada dan dimiliki oleh masyarakat manapun yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya yang pada awalnya sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Bahkan kearifan lokal menjadi ciri awal dari sebuah masyarakat dalam proses perkembangannya dari segi sosial, budaya yang menampilkan keunikan masyarakat. Persoalannya adalah, apakah kearifan lokal masih ada dan kuat dalam kehidupan masyarakat kita? Bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mempertahankan kearifan lokal?

Eksistensi kearifan lokal menjadi kajian yang menarik, karena adanya beberapa dimensi yang terkait dengan kearifan lokal. Dalam realitas sosialnya, kearifan lokal tidak hanya dipahami secara parsial, akan tetapi secara komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Ise (Habbinudin, 2014:80-81) bahwa dimensi tentang kearifan lokal terkait dengan beberapa aspek kehidupan masyarakat antara lain adalah 1) *Pengetahuan lokal*. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan lokal terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal merupakan komponen esensial dari setiap pengembangan masyarakat, anggota masyarakat memiliki pengalaman dari masyarakat tersebut, tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya, dan ciri-ciri khasnya; 2) *Kebudayaan atau nilai-nilai lokal*. Setiap

masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal itu biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam. Nilai-nilai tersebut mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakat; 3) *Keterampilan lokal*. Setiap masyarakat memiliki kemampuan bertahan hidup, keterampilan yang dikuasai oleh anggota masyarakat pada berbagai fase kehidupannya, mungkin melalui pekerjaannya, minat-minat untuk mengisi waktu luang atau dipelajari dari anggota keluarga; 4) *Sumber daya lokal*. Masyarakat menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran, namun dipergunakan secara bersama-sama; 5) *Proses/pengambilan keputusan lokal*. Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan ke'suku'an. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat, proses-proses masyarakat lokal biasanya berbagai hal itu dilakukan dan bekerja dalam lingkup tradisi mereka; 6) *Solidaritas lokal*. Masyarakat pada umumnya dipersatukan oleh ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. Setiap masyarakat mempunyai media untuk mengikat warganya dapat dilakukan melalui ritual agama atau secara adat dan upacara lainnya. Masing-masing masyarakat saling memberi dan saling menerima sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Perubahan sosial budaya telah melemahkan eksistensi kearifan lokal. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dengan masuknya nilai-nilai globalisasi yang berpengaruh dalam semua aspek kehidupan akan mengurai kekuatan-kekuatan dalam dimensi kearifan lokal. Oleh karena itu, untuk memperkuat eksistensi kearifan lokal diperlukan sinergisitas peran semua komponen masyarakat.

B. Kearifan Lokal dalam Tantangan Global

Kearifan lokal melemah karena budaya global. Kenichi Ohmae menunjukkan bahwa telah lahir budaya dunia oleh arus globalisasi yang ditunjukkan dengan lahirnya suatu dunia-tanpa-batas bahkan hancurnya negara-negara oleh dunia-tanpa-batas tersebut. Budaya global adalah lebih berupa Amerikanisasi dari budaya dunia. Westernisasi atau lebih tepat Amerikanisasi budaya global tersebut menurut Ohmae dibuktikan dengan penggunaan bahasa Inggris-



BAB VI

MODAL SOSIAL DAN AKUNTABILITAS SEKOLAH

Modal sosial diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat membutuhkan modal sosial dalam proses pengelolaan pendidikan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam menerapkan akuntabilitasnya. Isu akuntabilitas mulai berkembang karena masyarakat mulai mempertanyakan pendidikan yang berkualitas, keadilan dalam pendidikan, efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini sekolah yang bertanggung jawab sebagai lembaga pendidikan formal belum seluruhnya optimal dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dari segi kualitas dan kuantitas. Segi kuantitas terbukti bahwa jumlah dan kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu pada semua jenjang pendidikan belum merata, bahkan kesenjangan dalam pendidikan terus menjadi fenomena sosial. Segi kualitas, persoalan yang dipertanyakan terkait dengan sistem manajemen dan hasil dari sistemnya yakni *output* pendidikan.

Indonesia masih menghadapi masalah pendidikan yang sangat kompleks. Fenomena yang terjadi bahwa penyelenggaraan pendidikan yang UUD 45 tentang hak untuk sekolah, tetapi realitasnya adalah banyak pungutan pendidikan! Jadi hak pendidikan belum diwujudkan sesuai dengan UUD. Wajib belajar belum terealisasi pada masyarakat Indonesia. Ada kontradiksi dalam Ujian nasional dengan prinsip dalam UUD 45. Ada kontradiksi dalam Ujian nasional dengan prinsip dalam UUD 45. Demikian halnya, persoalan pembayaran pajak yang tidak disiplin dalam pengelolaan oleh negara, menjadi sumber persoalan kurangnya dana pendidikan. Ada kecenderungan bahwa pemerintah tidak menghitung kebutuhan dana pendidikan sesuai dengan PP 19, sehingga antisipasi terhadap

kebutuhan dana pendidikan tidak diantisipasi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing level dan daerah. Ada kecenderungan problem dana pendidikan kurangnya dana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan berdampak bahwa dana kadang diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan, misalnya digunakan untuk perjalanan dinas dan lain-lain. Trend Perkembangan Pendidikan Nasional, dipengaruhi oleh kondisi geografis dan demografis. Kondisi geografis dipengaruhi oleh jumlah provinsi 33 dan kabupaten 483, kecamatan 6520, desa 75666, sedangkan dari aspek demografis dipengaruhi oleh jumlah total penduduk 228.523.300 yang terdiri dari anak usia 4-18 tahun = 63.974.163 dan usia 19-24 tahun = 26.990.000. Sedangkan di lihat dari tend perkembangan pada tingkat satuan pendidikan kondisi untuk TK/RA jumlah untuk negeri dan swasta = 83.386, SD/MI = 165.397, SMP/MTs = 42.069, SMA/MA = 16.400 dan PT = 3.532, persoalan kualitas dan pemerataan masih menjadi masalah pendidikan (Dwiningrum, 2012:2-3).

Problem yang sangat kompleks adalah pendidikan yang menyentuh kepentingan setiap orang belum terealisasi. Dalam hal inilah, pendidikan harus dikelola secara desentralistik dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk mengelola pendidikan di daerah masing-masing ternyata belum berjalan sesuai dengan tujuan, karena tidak terdapat hubungan hirarkhis antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi obyektif pengelolaan pendidikan nasional, belum terbangun sistem pengelolaan pendidikan secara nasional yang utuh dan terpadu, tidak terdapat komunikasi hirarkhis organisatoris antara pengelolaan tingkat Kabupaten/Kota dengan Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara otonom, pada tingkat Kabupaten/Kota. Pengawasan dan pengendalian pada tingkat propinsi dan pusat tidak dilakukan secara optimal.

Beberapa paparan persoalan di atas menggambarkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia sangat kompleks, baik dari aspek kebijakan, manajemen, dan juga dalam pelaksanaan pada tingkat satuan pendidikan. Persoalan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan bersifat struktural dan kultural. Problem struktural berumber dari persoalan kebijakan dan manajemen pendidikan yang terkait dengan persoalan pemerataan, mutu dan administratif,

sedangkan dari dimensi kultural terkait dengan nilai-nilai yang dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu sumber masalah pendidikan di Indonesia adalah sulitnya membangun akuntabilitas, karena hal tersebut belum menyatu dalam setiap pribadi, utamanya para pendidik dan pengelola pendidikan. Dalam konteks ini, persoalan akuntabilitas terkait dengan masalah sistem dan masalah personal-individual yang memperkuat isu akuntabilitas pendidikan mulai diperbincangkan.

Isu akuntabilitas mulai berkembang karena masyarakat mulai mempertanyakan pendidikan yang berkualitas, keadilan dalam pendidikan, efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini sekolah yang bertanggung jawab sebagai lembaga pendidikan formal belum seluruhnya optimal dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dari segi kualitas dan kuantitas. Segi kuantitas terbukti bahwa jumlah dan kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu pada semua jenjang pendidikan belum merata, bahkan kesenjangan dalam pendidikan terus menjadi fenomena sosial. Segi kualitas, persoalan yang dipertanyakan terkait dengan sistem manajemen dan hasil dari sistemnya yakni *output* pendidikan. Realitas sosialnya, menunjukkan bahwa ada kecenderungan manajemen sekolah belum berjalan secara efektif dikarenakan oleh akuntabilitas sekolah cenderung rendah. Padahal, sekolah sebagai basis manajemen dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitas bagi publik. Kegagalan dalam membangun sekolah yang akuntabel dikarenakan persoalan personal yang terjadi di sekolah dimana individu belum mampu berperilaku berdasarkan motivasi yang akuntabilitas kuat. Sebagai akibatnya, ada kecenderungan bahwa kompleksitas pendidikan sarat dengan rendahnya akuntabilitas yang melekat dalam pengelolaan pendidikan. Ada kecenderungan bahwa akuntabilitas sekolah belum menjadikan akuntabilitas sekolah sebagai masalah yang harus dipelajari dan diterapkan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Paparan bab ini mencoba untuk mewacanakan bagaimana akuntabilitas sekolah dipahami dan dikembangkan dalam membangun kualitas pendidikan serta peran modal sosial dalam menerapkan akuntabilitas di sekolah.

A. Modal Sosial dan Konsep Dasar Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi dalam pendidikan. Hopkins dan Levin (2000:18-19, dalam Harris 2002:7-8) memberikan saran terkait dengan reformasi dalam skema besar yang mencakup beberapa fokus berikut ini.

Aspect	Description
Curriculum	Governments have instituted more restrictive curriculum requirement including increased emphasis on sciences, technology, and basic skills such as literacy.
Accountability	Governments have increased testing of students and have made the results public, and in some cases put in place extensive external inspections of schools.
Governance	While governments have centralized curriculum and assessment, they have also decentralized many decision from intermediate bodies such as local authorities to individual schools, and given parent and increased role in school governance, all of which has put new pressures on professional staff.
Market force	Government has tried to introduce market elements to schooling through increasing the opportunity-or requirement-for parent to choose parents and students.
Status of teacher	In a number of countries the status of teachers and their organizations has been attacked directly through unilateral changes by government to the status of unions or to collective bargaining arrangements.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk proses perubahan sekolah ke arah yang lebih baik diperlukan kemampuan sekolah diperlukan akuntabilitas. Perubahan kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik jika akuntabilitas sudah menjadi bagian dari budaya sekolah. Akuntabilitas dan faktor lainnya menjadi sistem yang baru dikembangkan oleh sekolah yang akan melakukan perbaikan kualitas. Pemikiran Harris membuktikan bahwa proses reformasi sekolah bukan pekerjaan yang mudah, tetapi proses panjang yang harus dilalui oleh negara yang ingin atau sedang mengubah kebijakannya, dan juga sekolah yang akan menerapkan setiap perubahan kebijakan pendidikan baru. Dalam hal ini sependapat dengan Harris bahwa strategi pengembangan sekolah antara negara, dan antarsekolah seringkali berbeda, sebagai konsekuensinya hasilnya tidak akan sama. Kecepatan sekolah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sekolah yang berkualitas ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam pengembangan

kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Harris (2002:12-14) bahwa:

Schools have capacity to improve themselves, if the conditions are right. A major responsibility of those inside the schools is to help provide these conditions for those outside. Schools improvement is an effort to determine and provide, from without and within, conditions under which the adults and young sters who in habit schools will promote and sustain learning among themselves.

Dari berbagai hasil penelitian di beberapa negara membuktikan bahwa perbaikan sekolah adalah proses sistemik yang membutuhkan peran yang sinergitas dari seluruh komponen dalam sekolah. Upaya perbaikan kualitas pendidikan, khususnya pada level sekolah merupakan proses yang bersifat komprehensif karena membutuhkan dukungan dari semua unsur sekolah untuk mendukung tujuan membangun sekolah berkualitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Harris (2002:11-13) yang menjelaskan tentang *model of educational changes* sebagai proses untuk membantu sekolah untuk sukses dalam melakukan perubahan memerlukan seperti yang dirumuskan berikut ini.

- a. *Schools improvement research has demonstrated the vital importance of teacher development in school change;*
- b. *Schools improvement research has reinforced the importance of leadership in securing school-level change;*
- c. *Schools improvement work has shown that there is no one blueprint action, but approaches to improvement will carry across different types of schools.*
- d. *The schools improvement movement has reinforced the necessity of relating change effort to specific student outcomes;*
- e. *The schools improvement movement has demonstrated the importance of understanding and working with school culture.*

Keberhasilan dalam membangun sekolah berkualitas membutuhkan akuntabilitas yang dapat dibangun dalam budaya sekolah. Proses untuk membangun budaya sekolah yang akuntabel membutuhkan dukungan dari semua komponen sekolah. Kerja antar komponen sekolah dalam membangun sekolah berkualitas membutuhkan

energi sosial yang efektif, yakni modal sosial. Dengan penguatan modal sosial maka budaya sekolah yang akuntabel lebih cepat direalisasikan di sekolah.

Modal sosial (Bourdieu, 1986:248) diartikan sekelompok sumber-sumber aktual atau potensial yang berhubungan dengan kepemilikan suatu jaringan yang bertahan dari hubungan-hubungan yang kurang atau lebih melembaga dari saling mengetahui atau menghargai. Sedangkan Fukuyama, modal sosial merupakan kemampuan orang-orang bekerja bersama-sama untuk tujuan-tujuan umum di dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai keadaan seperangkat nilai-nilai atau norma-norma informal tertentu yang saling digunakan diantara anggota-anggota kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka. Sejalan dengan pendapat Fukuyama, Woolcock (1998:153), mendefinisikan modal sosial sebagai *"the information, trust, and norms of reciprocity inherent in one's social work"*. Dalam konteks ini membuktikan bahwa modal sosial merupakan salah aspek penting yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja.

Modal sosial sangat diperlukan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di lingkungan sekolah. Akuntabilitas sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan, secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*). Akuntabilitas terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Akuntabilitas tak dapat dipisahkan dengan dimensi moral. Sebagaimana dijelaskan oleh Headington (2000:83) berpendapat bahwa *accountability has moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of the education system*. Ketiga dimensi yang terkandung dalam akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan



BAB VII



MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pembangunan dapat berjalan dengan optimal jika didukung oleh modal sosial. Persoalannya adalah kesadaran tentang pentingnya modal sosial belum dipahami oleh masyarakat. Bahkan, ada kecenderungan bahwa modal sosial mulai melemah dalam kehidupan sosial. Modal sosial bahkan belum dinilai sebagai aspek penting dalam membangun dinamika masyarakat. Modal sosial terbukti mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Namun, di Indonesia pembangunan pendidikan belum mempertimbangkan peran modal sosial sebagai energi sosial yang dapat mendorong keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan. Hasil riset yang dipaparkan dalam salah satu bab pada buku *"The Role of Social Capital in Developmental An Empirical Assessment"*, khususnya tentang *The creation and transformation of social capital* ditulis oleh Grootaert, Christiaan, and van Bastelaer (2002). Grootaert, memberikan gambaran empirik tentang peran modal sosial dalam proses pembangunan. Bab ini dapat menjadi refleksi dalam mencermati proses pembangunan pendidikan yang terkait dengan dinamika dari peran modal sosial. Hasil riset Grootaert membuktikan bahwa proses pembangunan tak cukup dengan modal ekonomi, akan tetapi efektivitas pengembangan modal sosial menjadi kajian sosiologis yang dalam aplikasinya tak lepas dari berbagai kepentingan politik-ekonomi. Pemahaman hasil riset tersebut dapat menjadi sumber informasi bagi Indonesia dalam menggunakan modal sosial dalam proyek pembangunan pendidikan.

Efek dari modal sosial, faktor-faktor penentu modal sosial cenderung kurang dipahami dengan baik. Apakah modal sosial ditentukan secara khusus oleh jangka panjang kekuatan-kekuatan sejarah, budaya, dan ekonomi? Atau hal itu dapat mempengaruhi

dalam jangka pendek oleh kebijakan? Jika demikian, bagaimana? Satu bacaan karya Putnam di Italia (1993) adalah bahwa modal sosial merupakan hasil dari pembangunan jangka panjang kelembagaan dan mungkin sangat sulit untuk menghasilkan. Literatur lain menunjukkan bahwa modal sosial organisasi dapat terkikis oleh struktur ekonomi kembali (Heying, 1997; Schulman dan Anderson, 1998) dan juga dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat baik melalui organisasi-organisasi nasional (Minkoff, 1997) atau pengorganisasian masyarakat dalam interaksi tatap wajah ke wajah (Wood, 1997) (Grootaert, 2002:125-153).

Dalam uraian pada buku Grootaert membuktikan bahwa satu masalah yang mengganggu banyak studi tentang modal sosial adalah sulitnya menyimpulkan penyebab dari korelasi dalam data retrospektif. Sebagai contoh, korelasi antara modal sosial dan dana dari luar bisa muncul jika dana modal sosial dipromosikan, jika kelompok dengan modal sosial yang lebih menarik lebih banyak dana, atau jika beberapa faktor ketiga yang terkena dampak baik dana dan modal sosial. Di antara korelasi pelatihan organisasi dan modal sosial dapat mencerminkan baik efek dari pelatihan atau penilaian donor bahwa pelatihan sangat dibutuhkan.

Analisis yang dilakukan Grootaert pada tulisan ini adalah memperhatikan dampak kausal dengan menggunakan sebuah pelacakan, evaluasi prospektif. Kajian yang dilakukan dengan meneliti tiga proyek yang dilakukan oleh *Internationaal Christelijk Steunfonds* (ICS), sebuah LSM Belanda. Sejak ICS telah membatasi keuangan dan sumber penghasilan administrasi, proyek tersebut secara bertahap. Ketiga proyek bervariasi secara eksplisit berusaha untuk membangun modal sosial dan sifat bantuan yang diberikan. Salah satu proyek yang terlibat tidak ada partisipasi, salah satu partisipasi masyarakat yang terlibat cukup besar, dan satu yang terlibat organisasi dan pelatihan manajemen untuk organisasi kemasyarakatan adat. Proyek pertama adalah penyediaan buku pelajaran sekolah dasar pada tahun 1996 dan 1997. Orang tua dan pejabat sekolah memiliki peran dalam memutuskan sekolah mereka akan menerima buku pelajaran apa. Proyek kedua, yang memberikan hibah kepada komite sekolah pada tahun 1997, lebih partisipatif. Orang tua terpilih komite sekolah mengusulkan rencana penggunaan dana dan keputusan akhir dibuat dalam sebuah pertemuan terbuka dari orang tua. LSM kemudian diperoleh dan menyampaikan

masukan yang diminta. Proyek ketiga yang dirancang secara eksplisit untuk membangun kapasitas organisasi antara kelompok-kelompok perempuan, dan termasuk pelatihan bagi para pemimpin kelompok dalam manajemen organisasi dan kelompok-bangunan teknik, serta pelatihan agraria dan penyediaan *input* agraria.

Hasil penelitian Grootaert menemukan sedikit hubungan antara sejauh mana program berupaya untuk mendorong pengembangan modal sosial dan hasil modal sosial. Nalk turun program buku pelajaran dan program yang lebih partisipatif dari hibah untuk komite sekolah memiliki efek yang sama. Baik komite sekolah secara substansial dipengaruhi maupun kehadiran orang tua, tetapi keduanya guru ditingkatkan kehadiran dan usaha. Program kelompok perempuan, dengan fokus yang jelas pada modal sosial dan pelatihan organisasi, tidak meningkatkan indikator modal sosial. Bahkan, hal itu mengarah masuk ke dalam keanggotaan kelompok dan kepemimpinan laki-laki dan wanita muda yang lebih terdidik dengan pekerjaan formal, sehingga mengubah yang sangat karakteristik dan komposisi kelompok-kelompok ini yang membuat mereka menarik bagi donor. Hasil kami menunjukkan hati-hati tentang upaya yang disengaja untuk "membangun" modal sosial. Misalnya, bagian besar dana proyek yang menghabiskan membawa para pemimpin kelompok-kelompok perempuan untuk seminar dan pertemuan dan memperkerjakan ahli untuk melatih mereka mungkin lebih baik dihabiskan di tempat lain.

Desain partisipatif dan pelatihan organisasi tidak berkorelasi dengan hasil modal sosial dalam data, bentuk bantuan tetap dapat mempengaruhi modal sosial. Penyediaan alat pelatihan dan agraria bagi para pemimpin kelompok-kelompok perempuan mencari sewa yang cukup besar bagi pemimpin kelompok, dan ini mungkin telah merangsang memiata sewa. Sebaliknya, penyediaan buku pelajaran sekolah yang ditawarkan sepertinya berpejuang lebih sedikit mendorong aktivitas kolektif di daerah yang lebih alami dilakukan secara individual, seperti produksi pertanian, dapat menciptakan peluang untuk mencari sewa, sehingga melemahnya modal sosial daripada menciptakan itu.

Hasil analisis Grootaert lebih lanjut menyimpulkan bahwa adanya efek penyediaan buku dan hibah kepada komite sekolah pada modal sosial di sekolah. Bagian berikut mengikuti analisa bagaimana

penyediaan pelatihan organisasi dan input pertanian yang terkena dampak modal sosial dalam membantu diri kelompok perempuan.

A. Buku Pelajaran dan Sekolah Program Hibah

Bagi Indonesia proses pembangunan pendidikan tak lepas dengan peran buku sebagai sumber belajar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Politik buku tetap menjadi kajian dalam memperbaiki kualitas belajar di sekolah. Bahkan buku ajar tetap menjadi polemik pemerintah ketika dikaitkan dengan perubahan kurikulum. Buku menjadi alat dan juga media yang dinilai memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir siswa. Di sisi lain, buku menjadi bagian proyek pemerintah yang cukup menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai sumber informasi.

Kajian Grootaert mencoba untuk mencermati hasil penelitian tentang buku pelajaran dan sekolah hibah. Bagian ini mengkaji dampak dari program yang disediakan seperangkat buku pelajaran yang telah ditetapkan ke sekolah-sekolah pada tahun 1996 dan 1997 dan lebih program partisipatif dari hibah kepada komite sekolah yang dimulai pada tahun 1997. Kami pertama memberikan latar belakang pada proyek-proyek sekolah dasar dan menggambarkan proyek terhadap partisipasi orang tua dan usaha guru. Bagi Indonesia program buku menjadi salah satu proyek nasional yang efektivitasnya belum pernah dikaji secara intensif dan komprehensif, seperti halnya program BOS buku masih belum terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, korupsi terkait dengan penyediaan buku teks terus terjadi dalam dunia pendidikan, yang membuktikan bahwa belum ada satu kesadaran tentang peran modal sosial dalam proses penyediaan buku pendidikan.

1. Sekolah pemerintahan di Kenya

Pengalaman di Kenya pemerintah nasional mempekerjakan dan membayar guru, sementara orang tua membayar berbagai biaya untuk membiayai input bukan guru rutin, seperti kapur tulis, buku-buku untuk guru, dan pemeliharaan bangunan sekolah. Orang tua juga dengan kolektif bertanggung jawab membesarkan dana untuk proyek pembangunan sekolah, seperti pembangunan kelas. Pembiayaan orang tua total sekitar \$ 7 per siswa per tahun.

Setiap sekolah memiliki komite sekolah terdiri dari empat belas anggota. Sembilan dari anggota perwakilan orang tua untuk setiap tingkat kelas (termasuk kelas lanjutan) yang dipilih oleh orang tua anak-anak di kelas itu. Tiga anggota mewakili sekolah (biasanya sebuah gereja) dan ditunjuk oleh sponsor, dua dari anggota mewakili dan ditunjuk oleh dewan pendidikan kabupaten. Sebagian besar anggota komite yang ditunjuk juga memiliki anak di sekolah. Rata-rata anggota dalam sampel kami adalah empat puluh sembilan tahun, memiliki tiga anak di sekolah, dan telah bertugas di komite selama tiga tahun. Komite sekolah memilih ketua dan bendahara dari antara anggotanya dan kepala sekolah berfungsi sebagai sekretaris komite.

Komite sekolah menetapkan biaya kegiatan dan pembangunan di awal tahun, tetapi banyak orang tua sering gagal untuk membayar biaya penuh. Siswa yang belum membayar biaya wajib dapat dikirim pulang dari sekolah, tetapi mereka sering kembali dengan hanya sebagian kecil dari biaya yang diperlukan dan tetap diizinkan. Komite sekolah memutuskan bahwa pada prinsipnya diratifikasi oleh majelis yang terbuka dari orang tua dan guru yang dikenal sebagai orang tua-guru asosiasi (PTA). Setelah komite sekolah telah menetapkan kebijakan (seperti biaya sekolah) untuk tahun ini dan menetapkan penggalangan dana dan anggaran pembangunan untuk sekolah disebut pertemuan PTA. Baik PTA dan komite sekolah secara resmi seharusnya bertemu sekali setiap masa, atau tiga kali setahun.

Dalam praktiknya, kualitas komite sekolah sangat bervariasi. Beberapa sekolah telah aktif, komite berfungsi dengan baik; yang lainnya adalah terbelah oleh fraksi; dan yang lain tidak aktif, dengan kepala sekolah sebenarnya membuat keputusan yang paling benar. Kualitas komite sekolah memiliki efek penting pada organisasi sekolah, dana, dan moral. Komite termotivasi bekerjasama terlihat jelas kepada masyarakat dan cenderung untuk mendorong lebih banyak dukungan dari orang tua. Dalam beberapa kasus di mana kepala sekolah telah terbukti tidak efektif atau korup, komite sekolah ikut campur dengan pejabat Departemen Pendidikan untuk menghapus guru dari sekolah. Sebuah komite dibagi dapat menunda proyek, frustrasi orang tua, dan mengakibatkan kinerja sekolah miskin dan penolakan pendaftaran, karena relatif mudah bagi siswa untuk beralih ke sekolah dasar lainnya.

2. *Proyek-proyek Pendidikan*

Hasil evaluasi dari proyek-proyek yang berada di Busia dan kabupaten Teso, dua distrik pedesaan di Kenya barat. Keduanya padat penduduk distrik pedesaan yang relatif miskin untuk Kenya. Perekonomian terutama didasarkan pada pertanian skala kecil untuk penghidupan dan perdagangan pasar lokal. Ada beberapa produksi tanaman tunai terbatas kapas, tembakau, dan tebu. Upah agraria rata-rata harian sekitar \$ 0,05 (Gugerty 2000).

Pada tahun 1995-an, Departemen Pendidikan kantor distrik terpilih 100 sekolah dari 333 di Busia dan Kabupaten Teso untuk berpartisipasi dalam Program Bantuan Sekolah ICS. Sekolah-sekolah tersebut dipilih karena mereka dianggap menjadi khusus dalam membutuhkan bantuan, tetapi belum dibantu oleh Program Bank Dunia. Seratus sekolah secara acak dibagi menjadi empat kelompok untuk menentukan kelompok mana yang akan menerima dana dan kapan. Sekolah pertama dikelompokkan sesuai dengan divisi geografis mereka dalam setiap kabupaten. Dari daftar ini, setiap sekolah keempat, dimulai dengan yang pertama, ditugaskan untuk Grup Satu. Setiap awal sekolah keempat dengan sekolah kedua ditugaskan ke Grup Dua, dan sebagainya. Grup Satu sekolah menerima buku pelajaran pada awal 1996 dan lagi pada tahun 1997. Grup Dua sekolah menerima hibah pada awal 1997. Kelompok Tiga dan Empat sekolah membentuk kelompok perbandingan untuk evaluasi ini. Kedua program dan perbandingan sekolah menerima kapur sebagai kompensasi untuk keterlibatan mereka di dalam proyek. Grup Tiga sekolah menerima hibah pada tahun 1998 dan Grup Empat sekolah menerima mereka pada tahun 2000.

Sekolah yang berpartisipasi dalam program buku pelajaran tidak punya pilihan mengenai jumlah atau jenis buku-buku pelajaran yang diterima. Hal ini diputuskan oleh ICS. Sebaliknya, sekolah di program hibah bisa menghabiskan dana pada berbagai input, termasuk buku-buku, bahan-bahan kelas konstruksi, furnitur, atau persediaan lainnya. Komite sekolah, yang terbentuk dari perwakilan orang tua siswa dan kepala sekolah, mengusulkan bagaimana hibah tersebut akan digunakan dan keputusan akhir dibuat dalam sebuah pertemuan terbuka dari orang tua dan guru-guru. Oleh karena itu, program hibah lebih terdesentralisasi dan partisipatif dari program buku pelajaran.



BAB VIII

MODAL SOSIAL PADA SEKOLAH DASAR

Modal sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Pemetaan modal sosial diperlukan untuk memahami kekuatan modal sosial. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa modal sosial di sekolah belum dilakukan, sehingga modal sosial belum dijadikan sebagai energi kolektif yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sekolah. Pada bab ini akan dipaparkan modal sosial di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan Siti Irene Astuti Dwiningrum bersama dengan Suyata, Sidiq A. Kuntoro, sebagian data akan dipaparkan pada bab ini diharapkan memberikan gambaran empirik tentang modal sosial yang sudah dimiliki oleh sekolah.

Usaha membangun sekolah yang baik adalah sama dengan upaya membangun masyarakat yang baik. Sekolah adalah suatu tempat yang disengaja dibangun untuk menjadi tempat yang baik bagi kegiatan pendidikan dan belajar generasi anak dan pemuda dari suatu masyarakat. Sekolah sebagai masyarakat kecil yang dirancang menjadi tempat ideal di mana anak dan pemuda oleh orang tuanya dipercayakan untuk memperoleh asuhan dan pendidikan dari guru dan pengasuh lain. Guru memikul tanggungjawab "*in loco parentis*" sebagai pengganti orang tua yang dipercayai untuk mendidik anak dan pemuda. Hanya sekolah yang baik yang dapat membangun kehidupan anak dan pemuda yang baik (Kuntoro, 2010).

Sekolah yang terlalu mengejar capaian prestasi pengetahuan untuk dapat dikatakan sebagai sekolah yang berhasil, dengan melalui keberhasilan prestasi ujian nasional mungkin tidak dapat dikatakan salah sama sekali karena adanya tuntutan orang tua dan masyarakat. Akan tetapi sebagai ahli pendidikan atau pendidik seharusnya tidak berpikir sekedar pemikiran praktis, jangka pendek dan parsial,

namun dibutuhkan pemikiran pendidikan yang berdimensi normatif untuk mencapai atau mewujudkan nilai-nilai ideal dan apa yang seharusnya bagi kehidupan individu dan sosial. Pencapaian prestasi keilmuan yang tinggi tanpa dilandasi kekuatan nilai kebaikan (moral) akan menghasilkan tamatan sekolah yang mudah terbawa pada tindakan tidak bermoral yang dapat merusak kehidupan di masyarakat. Secara umum orang tua, para ahli, para kiai, pendeta, dan lain-lain lebih mengutamakan peran lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren, wihara, dan lain-lain) untuk menanamkan kekuatan nilai kebaikan pada diri siswa, seolah-olah meletakkan tugas pengembangan ilmu pengetahuan menjadi penting kedua, bukan pertama. Sementara lembaga pendidikan sekolah kita walaupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Tahun 2003) ditekankan tugas membangun moralitas (keimanan dan ketaqwaan) diletakkan pada nomor satu, tetapi dalam operasionalnya lebih tergeser menjadi tugas nomor dua.

Sekolah merupakan media pengembangan kehidupan sosial yang baik bagi anak dan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan belajar dalam rangka mewujudkan manusia yang baik dan cerdas. Sekolah memiliki modal sosial dan budaya untuk menjadi alat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Selama ini masyarakat lebih mengenal modal fisik, uang, atau manusia untuk dijadikan alat perbaikan kualitas sekolah, di mana modal fisik menunjukkan pada obyek fisik seperti gedung, tanah, modal manusia menunjuk pada kualitas manusia, modal uang menunjuk kepemilikan uang sebagai modal pembangunan atau pengembangan sekolah.

Konsep modal sosial makin populer di dalam usaha menjelaskan dan memahami fenomena pendidikan di sekolah. Kelompok anak yang berhasil dan kelompok anak yang gagal baik bertahan maupun menyelesaikan pendidikan mereka. Konsep modal budaya dan modal sosial berusaha menjembatani usaha menjelaskan dan memahami fenomena pendidikan dari tinjauan struktural seperti posisi dalam pelapisan sosial, aneka pengaturan, dan sejenisnya dan menekankan dominannya komponen struktur dan tinjauan subjektivitas pengalaman individual yang memusatkan pada komponen individu sebagai penentu keberhasilan. Pemahaman dan pemanfaatan konsep modal budaya dan modal sosial tepat digunakan menghadapi perubahan cepat yang terjadi dalam pendidikan dan konteksnya seperti devolusi kewenangan ke tingkatan yang lebih rendah,

kebutuhan adanya keterkaitan lintas sektor, dan penyebaran pengambilan keputusan ke masyarakat lokal dan kelompok volunteer (Schuller, Baron, dan Field, 2000:33-34). Karakteristik modal sosial dan modal budaya terletak pada usaha mencermati hubungan antaragen, pelaku, unit-unit sosial, dan lembaga; meletakkan posisi dan menjembatani analisis makro dan analisis mikro dengan berada di tengah; mengembangkan analisis multi disipliner dan interdisipliner; memasukkan kembali permasalahan nilai-nilai ke dalam wacana analisis keilmuan sosial; dan sebagai alat instrumental modal sosial memiliki ciri *self-heuristic* (Schuller, Baron, dan Field, 2000:35-36).

Modal sosial mulai diperhitungkan dalam proses pembangunan pendidikan. Modal sosial dinilai sebagai bagian kerangka kerja konseptual yang mulai diwacanakan dalam membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan dinamika kehidupan ekonomi-sosial dan budaya terkait dengan kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakatnya. Modal sosial memiliki peran penting dalam mengembangkan kehidupan masyarakat, dalam kaitannya dengan modal ekonomi dan modal budaya. Ada kecenderungan yang kuat bahwa pengembangan dinamika ekonomi untuk yang progresif ditentukan oleh kekuatan modal sosial yang dimilikinya, baik dalam mikro organisasi internal maupun dalam tataran makro yakni kedudukan organisasi di dalam masyarakat secara luas.

Peran modal sosial belum dinilai sebagai penting dalam proses perbaikan mutu sekolah. Ada kecenderungan bahwa sekolah belum menyadari dan menganggap penting bahwa modal sosial strategis untuk dikembangkan dalam proses belajar didalam keluarga maupun sekolah. Bahkan ada kecenderungan bahwa warga masyarakat belum menyadari apa dan bagaimana modal sosial dikembangkan sebagai aspek penting dalam perbaikan kualitas siswa dan sekolah. Fenomena yang menarik untuk dikritisi adalah adanya kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, bahkan mulai tidak dianggap penting oleh orangtua dan para pengelola pendidik. Realitas ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat akan peran modal sosial, sebagai modal penting bagi perbaikan mutu pendidikan dan di pihak lain tidak dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan.

Modal sosial belum dipahami dan disadari oleh sekolah. Modal sosial cenderung belum dibangun secara optimal bagi perbaikan mutu sekolah. Permasalahan penelitian adalah memetakan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki oleh sekolah? Bagaimana peran sekolah mengembangkan modal sosial? Pada bab ini akan dipaparkan hasil pemetaan modal sosial yang digali dengan alat ukur modal sosial yang dirancangan oleh *World Bank* yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya keadaan di sekolah.

A. Modal Sosial dalam Perkembangannya

Modal sosial mulai menjadi kajian yang menarik, karena modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumberdaya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selain unsur pembentuk utama tersebut juga ada unsur pembentuk lain dari modal sosial yang juga tidak kalah penting peranannya. Unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dari terbentuk atau terbangunnya kekuatan modal sosial di suatu masyarakat. Adapun unsur-unsur yang oleh Hasbullah (2006) antara lain adalah (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif (*proactive action*).

Dalam perkembangannya konsep modal sosial dikembangkan oleh James Coleman, didiskusikan lebih lanjut Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam. Menurut James Coleman (1990), atas hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*)

mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Hauberer, 2011:249).

Pierre Bourdieu menekankan pada aspek yang berbeda bahwa modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan bermanfaat, modal harga diri dan kehormatan seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya karier politik. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang selkit banyak terinstitusionalisasikan. Erat dan tahannya ikatan sama vitalnya. Modal sosial mempresentasikan 'agregat sumber daya yang potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama'. Nilai ikatan yang dijalin seseorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Ikatan antara koneksi sosial dan modal budaya atau modal finansial dengan mencontohkan profesi, seperti pengacara dan dokter yang memanfaatkan "koneksi sosial". Koneksi sosial memerlukan kerja (dalam John Field, 2010:23). Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis modal sosial (Hauberer, 2011:250).

Modal sosial adalah properti hubungan antara individu-individu yang merupakan aktor sumber daya yang dapat menggunakan dan manfaat dari hubungan sosial tersebut. Modal sosial diproduksi dalam struktur terbuka dan tertutup serta hubungan lembaga dan non lembaga adalah sama. Sumber daya tertanam dalam struktur yang berbeda mungkin manfaat tindakan yang berbeda. Selain itu, efek negatif sejauh ini diabaikan modal sosial, seperti pengecualian, harus dianggap sebagai topik bagaimana

modal sosial dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan. Sementara Bourdieu menyoroti kemudahan atas dukungan dan produksi dan pelestarian kepercayaan oleh modal sosial. Coleman melihatnya sebagai suatu aspek dari struktur sosial. Dia membedakan jenis kepercayaan modal sosial dan hubungan kewenangan, norma dan sanksi yang efektif, informasi organisasi sosial potensial dan sepadan. Demikian halnya yang dijelaskan oleh Putnam berkaitan dengan penguatan demokrasi dan *output* ekonomi masyarakat melalui jaringan sipil yang memfasilitasi penciptaan kepercayaan dan norma timbal balik (Hauberer, 2011:250).

Francis Fukuyama (2003) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan merasakan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat. Prasyarat modal sosial adalah aspek sosial budaya seperti norma-norma timbal balik dan kepercayaan umum dan aset kolektif (misalnya ekonomi, teknologi dan latar belakang sejarah) serta karakteristik individu dari responden tertentu (misalnya jenis kelamin, etnis). Selain itu, aspek sosial budaya merupakan produk dari modal sosial.

Modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut



BAB IX



MODAL SOSIAL DALAM PERBAIKAN MUTU

Pada bab ini akan dipaparkan analisis data kualitatif tentang modal sosial dalam proses perbaikan mutu. Modal sosial diperlukan bagi perbaikan mutu sekolah. Modal sosial akan optimal jika sekolah menciptakan kondisi yang mampu mengembangkan sumber daya pribadi menjadi sumber daya sosial. Penguatan modal sosial diperlukan agar siswa mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dalam mengembangkan menjadi sumber daya sosial. Pada pengembangan modal sosial dilakukan oleh sekolah, khususnya cara yang dilakukan oleh sekolah dalam penguatan modal sosial dengan mengembangkan fungsi pada unsur-unsur modal sosial.

Sekolah merupakan media pengembangan kehidupan sosial yang baik bagi anak dan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan belajar dalam rangka mewujudkan manusia yang baik dan cerdas. Sekolah memiliki modal sosial dan budaya untuk menjadi alat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Selama ini masyarakat lebih mengenal modal fisik, uang, atau manusia untuk dijadikan alat perbaikan kualitas sekolah, di mana modal fisik menunjukkan pada obyek fisik seperti gedung, tanah, modal manusia menunjuk pada kualitas manusia, modal uang menunjuk kepemilikan uang sebagai modal pembangunan atau pengembangan sekolah.

Usaha membangun sekolah yang baik adalah sama dengan upaya membangun masyarakat yang baik. Sekolah adalah suatu tempat yang disengaja dibangun untuk menjadi tempat yang baik bagi kegiatan pendidikan dan belajar generasi anak dan pemuda dari suatu masyarakat. Sekolah sebagai masyarakat kecil yang dirancang

menjadi tempat ideal di mana anak dan pemuda oleh orang tuanya dipercayakan untuk memperoleh asuhan dan pendidikan dari guru dan pengasuh lain. Guru memikul tanggungjawab "*in loco parentis*" sebagai pengganti orang tua yang dipercayai untuk mendidik anak dan pemuda. Hanya sekolah yang baik yang dapat membangun kehidupan anak dan pemuda yang baik (Kuntoro, 2010). Dalam kenyataannya, membangun sekolah yang baik memerlukan modal sosial.

Realitas sosialnya, ada kecenderungan bahwa dalam dunia pendidikan peran modal sosial masih belum dinilai sebagai aspek yang sangat penting dalam proses perbaikan mutu sekolah. Ada kecenderungan bahwa sekolah belum menyadari dan menganggap penting bahwa modal sosial adalah sangat strategis untuk dikembangkan dalam pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam proses belajar di dalam keluarga maupun sekolah. Bahkan, ada kecenderungan bahwa warga masyarakat belum menyadari apa dan bagaimana modal sosial dikembangkan sebagai aspek penting dalam perbaikan kualitas siswa dan sekolah? Fenomena yang menarik untuk dikritisi adalah adanya kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, bahkan mulai tidak dianggap penting oleh orang tua dan para pengelola pendidik. Realitas ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat akan peran modal sosial, sebagai modal penting bagi perbaikan mutu pendidikan dan di pihak lain tidak dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan.

Modal sosial menjadi kajian yang menarik dalam memahami fenomena pendidikan di Indonesia. Ada kecenderungan yang kuat bahwa peran modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat semakin melemah, padahal modal sosial sangat diperlukan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Schuller, Baron, dan Field (2000:33-34), bahwa konsep modal budaya dan modal sosial berusaha menjembatani usaha menjelaskan dan memahami fenomena pendidikan dari tinjauan struktural seperti posisi dalam pelapisan sosial, aneka pengaturan, dan sejenisnya dan menekankan dominannya komponen struktur dan tinjauan subjektivitas pengalaman individual yang memusatkan pada komponen individu sebagai penentu keberhasilan. Pemahaman dan pemanfaatan modal sosial tepat digunakan menghadapi perubahan cepat yang terjadi dalam

pendidikan dan konteksnya seperti devolusi kewenangan ke tingkatan yang lebih rendah, kebutuhan adanya keterkaitan lintas sektor, dan penyebaran pengambilan keputusan ke masyarakat lokal dan kelompok volunteer (Suyata, 2011).

A. Modal Sosial di Sekolah

Secara akademik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan "modal sosial"? Istilah "modal sosial" sebenarnya sudah lama dikenalkan oleh sosiolog kenamaan Emile Durkheim pada abad ke-19. Durkheim menyebut istilah "modal sosial" untuk menyatakan ikatan sosial antarmanusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Ia merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Sebagai contoh, misalnya, kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas kolektif antara pendidik, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai sebuah aktivitas kolektif, pendidikan memerlukan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemimpin sekolah, para guru, tenaga administrasi, murid, orang tua siswa, komite sekolah, dan tentu pemerintah. Jika semuanya fungsional sesuai tugas dan peran masing-masing, maka pendidikan akan berjalan baik dengan hasil yang baik pula.

Emile Durkheim membayangkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang ada. Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat tidak saja untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, tetapi juga untuk menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka. Apa yang dimaksudkan sebagai masyarakat oleh Durkheim tentu masyarakat dalam arti luas, termasuk masyarakat pendidikan. Emile Durkheim sadar sepenuhnya bahwa di setiap masyarakat selalu ada perbedaan di antara anggotanya, tetapi pada saat yang sama juga ada kesamaannya. Dalam konteks modal sosial ini, kesamaan lebih ditonjolkan daripada perbedaan. Ini tidak mudah, karena itu, diperlukan upaya penyadaran dari tokoh atau pemimpin masyarakat bahwa tatkala masyarakat ingin mencapai tujuan bersama maka ego

dan kepentingan pribadi selayaknya ditanggalkan dulu. Masyarakat harus disadarkan bahwa ada tujuan bersama yang hanya bisa dilakukan jika warga merasa dalam sebuah ikatan kuat untuk menjalankan peran secara bersama-sama. Ada "others" dan "otherness" yang bisa diperankan, kelebihan-kelebihannya dan selanjutnya dihargai (Rahardjo, 2010).

Dasar pemikiran Emile Durkheim tersebut yang membuktikan bahwa secara sosiologis konsep modal sosial telah melekat dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya konsep modal sosial terus menjadi kajian yang terus didiskusikan dari James Coleman, didiskusikan lebih lanjut oleh Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam, dan beberapa pemikiran lainnya. Persoalan yang akan dipaparkan dalam makalah ini lebih menekankan pada pemahaman tentang konsep dasar modal sosial dan bagaimana penguatan yang dapat dilakukan oleh sekolah jika modal sosial dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan.

Modal sosial mulai menjadi kajian yang menarik, karena modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu.

Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selain unsur pembentuk utama tersebut juga ada unsur pembentuk lain dari modal sosial yang juga tidak kalah penting peranannya. Unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dari terbentuk atau terbangunnya kekuatan modal sosial di suatu masyarakat. Adapun unsur-unsur yang dimaksudkan adalah

(Hasbullah, 2006:9-16): (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

Dalam perkembangannya konsep modal sosial dikembangkan oleh James Coleman, didiskusikan lebih lanjut Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam. Menurut James Coleman (1990), atas hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Hauberer, 2011:249).

Pierre Bourdieu menekankan pada aspek yang berbeda bahwa modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya karier politik. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbali balik perkenalan dan pengakuan yang seikit banyak terinstitusionalisasikan. Erat dan tahannya ikatan sama vitalnya: Modal sosial mempresentasikan 'agregat sumber daya yang potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama'. Nilai ikatan yang dijalin seseorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Ikatan antara koneksi sosial dan modal budaya atau modal finansial dengan mencontohkan profesi, seperti pengacara dan dokter yang memanfaatkan "koneksi sosial". Koneksi sosial memerlukan kerja (dalam John Field, 2010:23). Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis.

Robert D. Putnam mengembangkan konsep modal sosial dari Coleman dengan mengembangkan ide pokoknya tentang jaringan sosial yang memiliki nilai penting bagi individu. Dalam hal ini modal fisik tetap ada dalam objek fisik, sedangkan modal manusia adalah milik individu dan melekat pada hubungan antar individu-individu yang membentuk jaringan sosial, norma timbal-balik dan kepercayaan (Putnam 2000:18-19 dalam Hauberer 2011). Pendapat Putnam (2000:19 dalam Suharjo, 2014: 74) menjelaskan bahwa modal sosial sebagai "*social capital refers to connections among individuals-social network and norms of reciprocity and trust worthiness that arise from them. In that sense social capital is closely related to what some have called civic virtue*".

Putnam memberikan definisi ringkas modal social: '*by Social capital*' I mean features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives' (Putnam, 1996: 56 dalam Baron, Field and Schuller, 2000 dalam Suharjo 2014: 74). Ketiga elemen tersebut – jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) – adalah tritunggal yang mendominasi diskusi konseptual Putnam yang menekankan perbedaan modal social dengan modal-modal lainnya. Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan (Field, 2010:51). Sedangkan Francis Fukuyama (2002) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan merasakan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat. Prasyarat modal sosial adalah aspek sosial budaya seperti norma-norma yang bersifat timbal balik dan kepercayaan umum dan aset kolektif (misalnya ekonomi, teknologi dan latar belakang sejarah) serta karakteristik individu dari responden tertentu (misalnya jenis kelamin, etnis). Selain itu, aspek sosial budaya merupakan produk dari modal sosial.



BAB X



MODAL SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Pada bab ini akan dipaparkan bagian dari penelitian Siti Irene Astuti Dwiningrum dan Rukiyati tentang pengembangan modal sosial dalam pendidikan karakter bangsa. Hasil penelitian ini memaparkan data awal tentang tentang unsur-unsur modal sosial berperan dalam proses pendidikan karakter dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang secara sinergis dapat dikuatkan untuk mengatasi krisis karakter bangsa. Hasil penelitian ini sebagai data awal untuk mencermati peran dan persepsi kelompok masyarakat tentang masalah krisis karakter bangsa dan ide-ide yang dikembangkan dalam mengatasi krisis karakter bangsa. Hasil ini memberikan ide awal tentang bagaimana cara yang efektif untuk menggunakan modal sosial dalam pendidikan karakter bangsa.

Dengan membaca bab ini diharapkan ada ide-ide yang lebih kreatif dan proaktif dalam menggerakkan pendidikan karakter dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan mempelajari hasil penelitian ini diharapkan mengembangkan kekuatan modal sosial dalam masyarakat untuk mengatasi krisis karakter bangsa sangat multidimensional dan bersifat struktural.

Krisis karakter membutuhkan respon proaktif masyarakat. Masyarakat dalam menghadapi tantangan global masyarakat cenderung mengalami krisis yang mengarah pada kehancuran. Sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Lickona bahwa kehidupan yang mengarah pada kehancuran ditandai oleh (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer-group* yang kuat yang kuat dalam

tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan narkoba, alkohol, dan sex bebas), (5) semakin kaburnya pedoman moral dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga masyarakat, (9) membudayanya ketidak jujur, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (Muslich, 2011:35). Kehancuran masyarakat tersebut mulai menjadi fenomena di Indonesia, dan juga beberapa negara di dunia. Sebagai dampak dari kehancuran sosial tersebut memicu terjadinya krisis karakter yang bersifat multidimensional.

Krisis karakter merupakan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan krisis karakter terjadi seiring dengan perubahan masyarakat. Bagi Indonesia krisis karakter sebagaimana dijelaskan oleh Gede Raka (2007:4-6 sebagaimana dikutip Dwiningrum, 2010:51), antara lain: (1) Terlena oleh Sumber Masalah pertama, merasa bahwa persediaan sumberdaya alam identik dengan kekayaan. Padahal untuk mengubahnya menjadi kekayaan sumber daya alam ini harus diolah melalui proses yang memerlukan kecerdasan manusia. Artinya: tanpa diintervensi kecerdasan manusia sumber daya tetap tidak mempunyai nilai atau nilainya sangat rendah, bahkan bisa menjadi sumber malapetaka; (2) Pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Ukuran keberhasilan pembangunan yang kita banggakan pun sebagian besar lebih bersifat fisik yang mengabaikan pengembangan modal yang buntan bersifat fisik, atau modal yang terwujud atau modal maya, seperti tingkat kecerdasan bangsa, pembangunan karakter bangsa, yang justru menjadi tumpuan utama kemajuan ekonomi bangsa-bangsa lain di dunia; (3) Surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme "overdoses". Kecenderungan yang terlalu mengedepankan keberhasilan ekonomi (jangka pendek) telah membuat sebagian dari masyarakat terperangkap dalam pragmatisme yang *overdoses*, dan kemudian terjebak dalam sikap atau perilaku 'tujuan menghalalkan segala cara'. Idealisme saat itu tidak penting, bahkan sering menjadi bahan cemoohan. Ini adalah era dimana banyak orang percaya bahwa orang jujur tidak bisa maju secara ekonomi; (4) Kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri. Upaya untuk mengatasi krisis karakter menjadi tanggung jawab warga masyarakat dalam era globalisasi. Problem

sosial budaya pada masyarakat global terjadi dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga efek perubahan berjalan lebih cepat dan menyebar dalam kehidupan bermasyarakat. Disorganisasi sosial, bahkan konflik sosial menjadi fenomena sosial yang terjadi di dalam negara dan antar negara di era global.

Disorganisasi sosial di kalangan remaja semakin kompleks. Tindakan yang menyimpang tindakan dari standar moral; sehingga banyak juga sikap anak-anak muda yang menunjukkan kesadaran akan moral, komitmen terhadap hak asasi manusia, kepedulian terhadap lingkungan dan kesadaran akan globalisasi dibandingkan dengan generasi-generasi mereka sebelumnya. Namun, tren anak muda secara umum lebih cenderung menunjukkan gambaran yang lebih kelam. Di bawah ini merupakan 10 indikasi yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik, kemunduran kesadaran masyarakat yang perlu dibangkitkan agar perkembangan moral para pemuda dapat menjadi lebih baik (Lickona, 2012:18-19): a) Kekerasan dan Tindakan Anarki; b) Pencurian; c) Tindakan Curang; d) Pengabaian terhadap Aturan yang Berlaku; e) Tawuran Antarsiswa; f) Ketidaktoleran; g) Penggunaan bahasa yang Tidak Baik; h) Kematangan Seksual yang Terlalu Dini dan Penyimpangannya; i) Sikap Perusakan Diri. Persoalan . Indikasi yang dipaparkan oleh Lickona membuktikan bahwa persoalan krisis karakter bangsa menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut sangat dibutuhkan pendidikan karakter untuk membangun bangsa yang bermoral. Wacana pendidikan karakter bukan sekedar isu nasional, akan tetapi menjadi isu global. Dari berbagai even seminar tentang moral, dibuktikan bahwa persoalan umum yang dihadapi oleh bangsa di dunia saat ini adalah menentukan standar moral. Adapun wacana tentang pendidikan nilai antara lain adalah (Lickona, 2012:31-36):

1. Adanya kebutuhan yang begitu jelas dan mendadak
2. Proses penghubungan nilai dan sosialisasi
3. Peran sekolah sebagai tempat pendidikan moral menjadi semakin penting ketika jutaan anak-anak hanya mendapatkan sedikit pendidikan moral dari orang tua dan ketika makna nilai yang sangat berpengaruh yang didapatkan melalui tempat ibadah lainnya perlahan tidak berarti dan menghilang dari kehidupan mereka.

4. Muncul konflik di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan dasar menyangkut etika.
5. Demokrasime miliki posisi khusus dalam pendidikan moral karena demokrasi tersebut merupakan bentuk pemerintah dalam suatu masyarakat.
6. Tidak ada satu hal pun yang dapat dianggap sebagai pendidikan tanpa nilai.
7. Pertanyaan tentang moral berada dalam pertanyaan-pertanyaan utama yang dihadapi baik secara individu rasial.
8. Pendidikan nilai di sekolah kini memiliki sebuah pandangan dasar makna yang mendukung perkembangan pendidikan.
9. Sebuah pernyataan *gambling* tentang pendidikan moral juga menjadi suatu yang penting jika ditunjukkan untuk menarik perhatian dan membentuk perilaku yang dimulai dari diri para guru.
10. Pendidikan nilai merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mungkin untuk dilaksanakan.

Wacana di atas membuktikan bahwa pendidikan karakter menjadi isu global yang harus direspon oleh setiap bangsa agar persoalan kemanusiaan dapat diatasi secara proaktif. Dalam hal ini pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, energi sosial yang dikelola secara kolektif sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan bangsa. Peran pendidikan diharapkan mempunyai kekuatan untuk membangun kembali nilai-nilai sosial-budaya yang mampu mengatur kembali berbagai kepentingan sosial. Dalam hal ini, pendidikan diharapkan menjadi kekuatan sosial dalam mengatasi krisis karakter.

Pendidikan karakter bertujuan untuk mengatasi krisis karakter yang terjadi pada masyarakat global. Pendidikan karakter berperan dalam mengembangkan potensi manusia secara optimal. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku siswa yang bertanggung jawab dalam menjalankan peran sosial di keluarga, masyarakat dan warga negara. Pendidikan karakter haruslah dilakukan dengan pendekatan holistik dan kontekstual agar hasilnya maksimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Dwiningrum (2011:52) bahwa masalah krisis karakter sudah bersifat struktural, maka pendidikan karakter harus dilakukan secara holistik dan kontekstual. Secara struktural artinya membangun karakter bangsa Indonesia dimulai dari keluarga, masyarakat dan negara.

Adapun model yang dikembangkan adalah usaha untuk melakukan pendidikan karakter secara holistik yang melibatkan aspek *"knowledge, feeling, loving, dan acting"* (Megawangi, 2005:2). Sedangkan aspek kontekstual terkait dengan nilai-nilai pokok yang diperlukan untuk membentuk kekuatan karakter bangsa mulai diinternalisasikan pada semua tataran masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual dapat membentuk orang-orang yang berkarakter dalam semua tataran kehidupan. Disamping itu, pendidikan karakter harus memperhatikan pendekatan sosial-budaya, karena proses krisis yang sudah terjadi dalam level kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter memerlukan dukungan sosial yang kuat agar hasilnya lebih optimal. Salah satu aspek penting dalam pendekatan sosial-budaya adalah mengkaji kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat.

Modal sosial merupakan unsur penting yang mampu mengatasi masalah krisis karakter dalam perspektif sosial-budaya. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi kekuatan modal sosial tidak sama dalam setiap level kehidupan masyarakat. Modal sosial dapat dipetakan kembali sebagai energi kolektif yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara di era global. Modal sosial dapat dikuatkan kembali dalam pendidikan di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat dengan menguatkan unsur-unsur pokok modal sosial dengan membangun sinergisitas sosialnya.

Modal Sosial dalam Pendidikan Karakter

Dalam kehidupan masyarakat ada kecenderungan yang sangat kuat yakni peran modal sosial mulai melemah. Padahal modal sosial merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Modal sosial mulai menjadi kajian yang menarik, karena modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumberdaya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu

daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Modal sosial mempunyai peran penting dalam membangun karakter bangsa, karena karakter bangsa ditentukan oleh eksistensi negara dalam menjaga identitas budaya. Keyakinan masyarakat bahwa identitas budaya mempunyai peran penting sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya dalam menjaga modal sosialnya. Hal ini senada dengan analisis yang dikembangkan oleh James Coleman yang didiskusikan lebih lanjut Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam. Menurut James Coleman dari hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya. Analisis Coleman, membuktikan bahwa peran modal sosial sangat penting dalam membangun relasi sosial yang sangat kuat dalam struktur sosial.

Modal sosial dibutuhkan dalam membentuk identitas budaya bangsa. Dalam realitasnya, identitas budaya bangsa mulai tergeser dengan budaya global yang menggambarkan nilai-nilai yang bersifat universal. Sebagaimana dijelaskan oleh Zamroni (2011) bahwa globalisasi ditandai dengan proses meningkatnya saling ketergantungan ekonomi, kultural, lingkungan, sosial dan lingkungan lintas negara yang bebas, serta munculnya kecenderungan bentuk dan proses homogenisasi, hibridisasi dan diferensiasi kultur (nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku masyarakat) global. Sebagai dampak globalisasi maka identitas budaya yang mencerminkan refleksi diri atau *self-image* yang tiap diturunkan dari keluarga kita, gender, budaya, etnik, dan proses sosialisasi individual" (Ting-Toomey) semakin tidak kuat, bahkan ada kecenderungan melebur

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa memiliki muatan tentang *moral knowing, moral feeling dan moral action*.



BAB XI

MODAL SOSIAL DAN RESILIENSI SEKOLAH

Pada bab ini akan dipaparkan bagian penelitian Siti Irene Astuti Dwiningrum dan Rani Widiowati yang meneliti tentang kebijakan *regrouping* dan resiliensi sekolah serta peran modal sosial dalam pengembangan mutu pendidikan. Data yang akan dipaparkan dalam bab ini: 1) mendeskripsikan proses kebijakan *regrouping* sekolah dan resiliensi; 2). mendeksirpsikan peran modal sosial dalam resiliensi sekolah, 3) mendeskripsikan manfaat modal sosial bagi pengembangan progam sekolah pasca erupsi Merapi.

Dengan mempelajari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipahami bahwa pertama *regrouping* merupakan kebijakan pemerintah dapat mengatasi persoalan pendidikan di daerah kawasan rawan bencana sehingga proses belajar dapat berjalan lebih efektif. *Regrouping* dapat mengembangkan resiliensi kepala sekolah, guru dan siswa sehingga terbangun resiliensi sekolah. Kedua, resiliensi sekolah membutuhkan modal sosial yang mampu menggerakkan energi kolektif warga sekolah pasca erupsi dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Ketiga, modal sosial bermanfaat bagi pengembangan progam sekolah pasca erupsi Merapi sehingga siswa tetap bersemangat belajar.

" Letusan Gunung Merapi yang terjadi sejak tanggal 26 Oktober 2010 dan mencapai puncaknya pada tanggal 5 November 2010 telah menjadi tragedi memilukan yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak ternilai besarnya. Bukan hanya korban harta benda tetapi juga korban nyawa. Hingga saat ini telah terdata ratusan rumah tinggal dan fasilitas umum (baik tempat ibadah, kantor pemerintahan

(dan bangunan sekolah) di wilayah lereng Merapi yang hancur atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (<http://ugm.ac.id/seminar/75-keberlanjutan-pendidikan-anak-pasca-erupsi-merapi.htm>)”

Penanganan dampak bencana di bidang pendidikan anak adalah pembangunan kembali fasilitas pendidikan (gedung sekolah) yang hancur atau rusak akibat letusan merapi. Ketika anak-anak bersama orang tua mereka telah pulang kembali ke rumah mereka dari lokasi pengungsian. Anak-anak tidak dapat langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar karena gedung sekolah mereka masih rusak dan belum dibangun kembali. Konsentrasi pemerintah masih tertuju pada upaya menyediakan rumah tinggal bagi warga, sementara penyediaan gedung sekolah menjadi prioritas kedua.

Kelangsungan proses pendidikan anak pada saat terjadi bencana merupakan amanah Konvensi Hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, yang di dalamnya terdapat 4 prinsip hak-hak anak, yaitu: *pertama* non diskriminasi, dimana semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan Negara. *Kedua*, kepentingan terbaik untuk anak. Setiap tindakan kewenangan oleh publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. *Ketiga*, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Anak juga mempunyai hak baik hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya. *Keempat*, partisipasi anak, dimana anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia, perkembangannya, serta diperhatikan pendapatnya. (<http://ugm.ac.id/seminar/75-keberlanjutan-pendidikan-anak-pasca-erupsi-merapi.htm>)

Keselamatan dalam proses belajar pasca bencana mendukung ratifikasi 168 negara termasuk Indonesia tentang *Hyogo Framework for Action 2005-2015 (HFA)* berkomitmen untuk: penurunan secara berarti hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan karena bencana yang dialami oleh masyarakat dan negara. Keberhasilan rencana tersebut akan sangat tergantung pada komitmen politik dan keterlibatan aktif masyarakat luas termasuk Perguruan Tinggi sebagai salah satu stakeholders dalam rencana aksi yang dimaksud (Wuryanti, 2007). Salah satu dari Lima prioritas HFA adalah pentingnya menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan

ketangguhan di semua tingkat (dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membangun kesiapsiagaan terhadap bencana demi respons yang efektif di semua tingkat pendidikan. Salah satu prioritas aksi PRB adalah pentingnya pengetahuan, inovasi, pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada semua tingkat/3 resiliensi. Dalam hal ini penting sekali ditingkatkannya pendidikan melalui integrasi PRB di sekolah baik kurikulumnya maupun budaya keselamatan sekolah.

Pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana pasca erupsi Merapi membuat kebijakan untuk menggabung atau *regrouping* sekolah-sekolah yang berada di Kawasan Rawan Bencana III. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 253/Kep. KDH/A/2011 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar, untuk itu pemerintah memutuskan kebijakan bahwasanya sekolah-sekolah tersebut akan digabung dan diganti nama kelembagaannya. Istilah penggabungan sekolah juga bisa disebut *Regrouping*.

Regrouping merupakan solusi dalam mengatasi persoalan pendidikan di daerah kawasan rawan bencana. Sebanyak 224 sekolah di kabupaten Sleman mengalami dampak erupsi merapi. Diantaranya jenjang TK yang berjumlah 72 sekolah, jenjang SD yang berjumlah 90 sekolah, jenjang SMP/MTS yang berjumlah 26 sekolah, jenjang SMA/MA yang berjumlah 16 sekolah, jenjang SMK berjumlah 15 sekolah dan jenjang SLB yang berjumlah 5 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut termasuk di daerah Kawasan Rawan Bencana 3 dalam radius 20 km dari Gunung Merapi, sehingga sekolah-sekolah tersebut harus direlokasi. Ada 15 sekolah yang rencananya akan direlokasi dan 4 sekolah yang digabung atau di-*regroup*. Dengan diputuskannya kebijakan tersebut, maka pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar.

Sekolah-sekolah yang di-*regrouping* di antaranya SD Negeri Pangukrejo yang digabung dengan SD Negeri Gondang menjadi SD Negeri Umbulharjo 2 dan SD Negeri Petung yang digabung dengan SD Negeri Batur menjadi SD Negeri Kepuharjo. Proses *regrouping* di SD Negeri Umbulharjo 2 telah berjalan, manajemen sekolah pun telah bersatu dan struktur organisasi telah diubah sejak dilantiknya kepala sekolah yang baru pada tanggal 7 Oktober 2011. Sekolah menanggapi positif dengan adanya kebijakan *regrouping* ini. Karena telah

diputuskannya Kebijakan *Regrouping* pada tanggal 29 Juli 2011 oleh pihak Pemerintah Dinas pendidikan Sleman sebagai yang memutuskan kebijakan. Gedung sekolah didirikan di SD Gondang yang dikembangkan, akan tetapi gedung belum selesai didirikan sehingga, kegiatan belajar mengajar siswa masih terpisah, SD Negeri Gondang di gedung sebelumnya, dan SD Negeri Pangukrejo masih di *shelter* yang didirikan oleh pemerintah sebagai tempat untuk belajar sementara karena SD Negeri Pangukrejo sebelumnya terletak di radius 20 km dari Gunung Merapi dan sekolahnya hancur total dan tidak dimungkinkan didirikan kembali gedung baru di wilayah tersebut mengingat secara geografis wilayah tersebut berada di Kawasan Rawan Bencana 3. Tentu saja hal ini menghambat proses administrasi sekolah, sehingga kepala sekolah mau tidak mau harus kesana kemari untuk menyelesaikan urusan administrasi sekolah, dan kepala sekolah merasa hal ini kurang efektif.

Dalam kebijakan *regrouping*, sekolah sebagai lingkungan kritis diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal, membangkitkan keterpurukan dan penyesuaian terhadap berbagai tuntutan perubahan maupun pengembangan kompetensi akademik sosial dan vokasional. Hal ini senada dengan pernyataan Ririkin dan Hoopman dalam Nan Handerson (2003:7) sebagai berikut:

"Resilience can be defined the capacity to spring back, rebound, successfully adapt in the face of adversity, and develop social, academic, and vocational, competence despite exposure to serve stress or simply to the stress that is inherent in today's world"

Jika dikaitkan dengan definisi di atas sesungguhnya setiap orang perlu untuk mengembangkan resiliensinya agar dapat tetap eksis dan beradaptasi dengan berbagai tuntutan perubahan sosial. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan aspek resiliensi, namun demikian dalam sekolah sesungguhnya dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan resiliensi siswa dan guru yang sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai perubahan (dalam Dwiningrum, 2011:211). Dalam membangun resiliensi sekolah sangat membutuhkan modal sosial yang mampu menggerakkan energi

kolektif warga sekolah pasca erupsi dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik.

Modal sosial mempunyai peran penting untuk dikembangkan dalam pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam proses belajar didalam keluarga maupun sekolah dalam pasca erupsi Merapi. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa warga masyarakat belum menyadari apa dan bagaimana modal sosial dikembangkan sebagai aspek penting dalam perbaikan kualitas siswa dan sekolah pasca erupsi? Fenomena yang menarik untuk dikritisi adalah adanya kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, bahkan mulai tidak dianggap penting oleh orang tua dan para pengelola pendidik. Realitas ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat akan peran modal sosial, khususnya untuk mendorong perbaikan mutu pada sekolah pasca erupsi Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

A. *Regrouping* Sekolah

Dasar dari penggabungan sekolah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Penggabungan juga dimaksudkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar sehingga perlu diambil kebijakan untuk menggabung, menghapus, dan atau mengganti nama sekolah dasar. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 953/900 tanggal 30 Juni 2000 tentang pertimbangan untuk penggabungan, penghapusan, pendirian, pendirian dan anti nama beberapa lembaga SD (Widiowati, 2012:23-25).

Penggabungan sekolah dasar merupakan salah satu cara untuk pengelolaan sekolah yang lebih baik. Pengelolaan sekolah merupakan proses menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan menyangkut visi, misi dan tujuan sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum dan program-program operatif sekolah.



BAB XII



PENGUKURAN MODAL SOSIAL

Masalah pengukuran modal sosial tidak mudah, banyak aspek yang harus dikaji dan dipertimbangkan dalam mengukur modal sosial. Secara teoritis, konsep modal sosial pun berkembang sesuai dengan konteks dan fokus kajian yang dikaji oleh para ahli. Untuk mengukur modal sosial perlu mempertimbangkan tujuan penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan salah satu contoh yang dikembangkan oleh *World Bank paper no 18 tentang Measuring Social Capital* yang dikembangkan oleh Cristiaan Grootaert dkk (2004).

Instrumen yang dikembangkan untuk mengukur modal sosial oleh Cristiaan Grootaert mencoba untuk memetakan aspek modal sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam semua aspeknya. Alat ini cukup detail untuk mengembangkan konsep dan indikator yang terkait dengan aspek-aspek yang melekat dalam modal sosial. Berdasarkan uji coba terhadap instrumen ini ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh peneliti, baik yang bersifat substansi maupun teknis. Secara substansi tidak semua daftar pertanyaan relevan dengan masalah yang akan diteliti terkait dengan modal sosial, sedangkan secara teknis dihadapkan pada kesulitan responden untuk menjawab dengan benar atas semua daftar pertanyaan maupun pernyataan dalam instrumen. Oleh karena aspek validitas dan reliabilitas atas instrumen ini masih perlu dikaji sesuai dengan tujuan penelitian. Namun demikian, instrumen tentang modal sosial memberikan pengetahuan awal tentang tidak mudahnya untuk menilai dan mengukur modal sosial dalam kehidupan masyarakat

Untuk menggunakan alat ukur ini masih perlu dicermati sesuai dengan konsep dan teori yang akan digunakan dalam

penelitian. Demikian halnya, aspek-aspek yang ingin diukur dapat dimodifikasi sesuai dengan konteksnya. Dengan membaca bab ini diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang lebih empirik cara untuk mengukur modal sosial

A. Pengukuran Modal Sosial

Pengukuran modal sosial dilakukan untuk dapat memetakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, sekolah, organisasi sosial dan aspek-aspek lain yang ada dalam kehidupan sosial. Dengan melakukan pengukuran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur tentang obyek. Sebagaimana dijelaskan oleh SS. Steven (Supratiknya, 2014:15-16), bahwa yang dimaksud dengan pengukuran adalah peneraan bilangan pada obyek atau peristiwa aturan tertentu. Definisi kedua, "measurement consist of ruler for assigning number to objects in such a way as to represent quantities of attributes", bahwa pengukuran terdiri atas perangkat aturan untuk menerangkan bilangan pada aneka obyek dengan cara sedemikian tupa untuk mencerminkan atau mengungkapkan kuantitas dari aneka atribut. Definisi ketiga, "measurement is the assigning of number to individuals in a systematic way a means of representing properties of the individual", bahwa pengukuran adalah pengenaan atau penetapan bilangan pada individu-individu secara sistematis sebagai cara mencerminkan atau mengungkapkan aneka ciri dari individu-individu yang bersangkutan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pengukuran adalah peneraan bilangan. Perbedaan, definisi pertama lebih menekankan adanya aturan yang mendasari peneraan tersebut. Sedangkan definisi kedua dan ketiga sama-sama menekankan tiga ciri penting dalam pengukuran yaitu (1) sifat sistematis, (2) sasarannya adalah atribut, dan (3) proses kuantifikasi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pengukuran modal sosial dapat dilakukan dengan secara sistematis yakni dengan menentukan atribut yang jelas sehingga proses kuantifikasi modal sosial dapat dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nunnally bahwa pengukuran sistematis dimaksudkan agar dalam proses yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Nunnally sebagai "in such a way" atau "in a systematic way" khususnya mengikuti "rules". Sedangkan dalam proses pengukuran perlu memperhatikan sasaran adalah atribut, dan bukan obyek atau individu atau orang melainkan properties atau attributes

dari obyek atau individu. Maksudnya, yang menjadi sasaran adalah aspek atau segi tertentu dari obyek atau orang yang disebut atribut, bukan obyek atau orangnya sendiri. Atribut pada orang bersifat fisik, seperti tinggi badan, berat badan, kekuatankepala dan sebagainya. Dalam konteks inilah, yang menjadi atribut adalah modal sosial. Sedangkan Sebagaimana proses kuantifikasi dimaksudkan bahwa bilangan yang digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah. Melalui kuantifikasi maka jumlah atribut atau banyaknya atribut yang terdapat dalam objek. Penentuan kuantitas atau jumlah atribut ini lazim dilakukn dengan cara counting atau menghitung (Supratiknya, 2014:20-23).

Cara melakukan pengukuran dilakukan dengan berbagai cara. Sebagaimana dijelaskan oleh Steven tentang pentingnya skala pengukuran. Dalam pengukuran memerlukan penskalaan, oleh karena digunakan istilah "jenis skala" atau "taraf pengukuran". Jika mengacu pada temuan Steven bahwa ada sejumlah jenis skala pengukuran. Adapun aturan pokok yang digunakan untuk menentukan jenis skala atau taraf pengukuran, yang didasarkan pada macam operasi empiris yang banyak digunakan untuk aturan dalam pengukuran, yaitu : (1) *determination of equality* atau penetapan kesetaraan atau kesamaan atau mengklasifikasian objek-objek atau kejadian-kejadian, (2) rank-ordering atau *determination of greater or less* atau penetapan urutan jebjang atau penetapan mana yang lebih mana yang kurang di antara objek-objek atau kejadian-kejadian, (3) *determination of equality of intervals or differences* atau penetapan kesetaraan atau kesamaan interval atau perbedaan di antara objek-objek atau kejadian-kejadian, dan (4) *determination of equality of ratios* atau penetapan kesetaraan atau kesamaan rasio di antara objek-objek atau kejadian-kejadian. Jenis skala atau taraf pengukuran berdasarkan jenis operasi yang mendasari akan menentukan jenis-jenis statistik yang cocok untuk diterapkan pada hasil pengukuran pada setiap jenis skala atau taraf pengukuran. Adapun jenis skala dan tarap pengukuran dibedakan oleh Steven adalah : (1) pengukuan nominal; (2) pengukuran ordinal, (3) pengukuran interval, dan (4) pengukuran rasio.

Pengukuran modal sosial dapat digunakan dengan berbagai cara tergantung tujuan penelitian. Pengukuran nominal dapat dilakukan untuk mengukur variable diskret, yaitu variabel yang hanya memiliki nilai-nilai bualat atau utuh, seperti halnya : jenis kelamin, agama, status pekerjaan, status perkawinan. Pertama, skala

nominal sebagai bentuk peneraan bilangan yang paling tidak mengenal batasan atau bentuk pengukuran primitive yang bahkan konon tidak layak disebut pengukuran sebab penggunaan bilangan sekadar sebagai nama atau label tanpa memanfaatkan nilai numeriknya. Untuk pengukuran yang ordinal, bilangan bisa menunjukkan *rank* atau urutan jenjang berdasarkan atribut yang diukur. Kedua, skala ordinal, menunjukkan urutan jenjang atribut yang sedang menjadi focus perhatian objek atau kejadian yang satu melebihi kuintitas lebih atau kurang dibandingkan dengan objek atau kejadian yang lain, namun interval atau jarak atau nilai yang mencerminkan kepemilikan atribut yang ditempati oleh masing-masing objek atau kejadian tersebut tidak diketahui. Pengukuran ordinal hanya bisa dimulai dengan menerapkan variabel kontinyu, yaitu variabel yang bisa ada atau muncul pada nilai berapapun tanpa batas. Ketiga, pengukuran interval sebagaimana dijelaskan oleh Steven menggambarkan cara pengukuran mencapai cara "kuantitatif", karena mengandung informasi tentang identitas urutan, bilangan pada pengukuran interval memiliki informasi tentang kesamaan jarak dan bilangan, yang berlaku secara kontinyu. Keempat, pengukuran rasio menunjukkan identitas, menunjukkan urutan jenjang, menunjukkan interval tau jarak yang sama antar nilai atau bilangan, dan menunjukkan nol mutlak.

Jenis pengukuran dapat digunakan dalam mengukur modal sosial, karena berbagai konsep dan teori tentang modal sosial menyangkut banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur modal sosial yang dapat diukur dalam kehidupan masyarakat. Contoh beberapa hal yang dapat diukur misalnya tentang: siapa mengetahui siapa (*Social Networks*), karakter network tersebut, kekuatan ikatan kita, level kepercayaan, levels timbal balik, tingkat kejujuran dalam berkomunikasi, tingkat komitmen. Lebih khususnya, dalam pengukur modal sosial perlu untuk mengkaji tipe kekuatan modal sosial, khususnya dari segi intensitasnya. menjadi aspek khusus yang menarik untuk dikaji intensitasnya.

Pengukuran intensitas modal sosial dapat digunakan untuk memahami dukungan sosial dan usaha yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial. Dengan mengukur ikatan modal sosial maka akan dipahami tentang kekuatan networking dalam berbagai interaksi sosial. Di samping itu, dengan melakukan pengukuran modal sosial akan memberikan gambaran yang lebih emperik tentang kekuatan maupun kelemahan modal sosial yang dimiliki oleh keluarga,

DAFTAR PUSTAKA

- Alchian, A.A. (1965). "Some Economics of Property Rights". *Il Politico*, 30: 816-829.
- Alchian and Demsetz. (1973). Property Right Paradigm. *Journal of Economic History*, 33 (March): 16-27
- Adams, J. Hayes, J. and Hopson, B.(eds) (1976) *Transition: Understanding and Managing Change Personal Change* London, Martin Robertson.
- Amich, Alhunan. "Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi". *Kompas*, 11 September 2000.
- Amstrong, M. (2006). *Resources Management Practice*. Philadelphia, PA: Kogan Page Limited.
- Ancok, D. (2003). "Modal Sosial". *Jurnal Psikologika*, vol 8, no. 15.
- Arcaro, Jerome S. (1995). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata langkah Penerapan*. Hak cipta oleh St. Lucie Press. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jkarta: Rhineka Cipta.
- Aswasulaskin (2014). *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Peningkatan Mutu Sekolah*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Baron, S., Schuller, T., Field, J. (2000). *Social Capital: Critical Perspective*. New York: Oxford University.
- Battiste, M. (2005). "Indigenous Knowledge: Foundations for First Nations". *World Indigenous Nations Higher education Consortium (WINHEC) Journal*.

- Becker, G.S. 1(1964). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education*. Chicago: The University of Chicago Press Books.
- Borg, W.R. and Gall, M.D. (1989). *Educational Research*. New York: Longman.
- Bourdieu, P. (1983). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp.241-258). New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, P. and Passeron, J.C. (1977). *Reproduction in Education, Society, and Culture*. London: Sage Publications.
- Cote, J.E. and Levine, C.G. (2002). *Identity Formation, Agency, and Culture: A Social Psychological Synthesis*. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates
- Colletta, N.J. and Perkins, G. (1995). *Participation in Education. Environment Department Papers*. No. 001.
- Cote, J.E. (1997). A Social History of Youth in Samoa: Religion, Capitalism, and Cultural Disenfranchisement. *International Journal of Comparative Sociology*, 38, 217-234.
- Cultural identity: www.napavaley.edu 7, diunduh 7 Mei 2012.
- Coleman, Jame S (1990). *Foundation of Social Theory*. USA: Harvard University Press
- Decker, Larry .E (2003). *Home, School, and Community Partnership*. UK: A Scarecrow Education Nook.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Pedoman Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Depdiknas.

- Depdikdasmen. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. *Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama.
- Dwiningrum, S.I.A.(2008). Pemulihan Psikologi-Sosial Pasca Gempa oleh Guru di Kabupaten Bantul DIY. *Cakrawala Pendidikan* (Nomor 2 Tahun 2008). Hlm. 201-212.
- Dwiningrum, S.I.A (2010). Peran Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1* (Nomor 1 Tahun 2010). Hlm. 30-42.
- Dwiningrum, S.I.A (2010). "Pendekatan Holistik dan Kontekstual dalam Mengatasi Krisis Karakter di Indonesia", dalam *Cakrawala Pendidikan*, Yogyakarta, UNY, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwiningrum, S.I.A .(2011). " Implementasi Pendidikan Karakter pada Matakuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) Dengan Pendekatan Masalah", dimuat dalam Proseding Seminar Nasional Budaya an Inovasi Pembelajaran Dalam Pemanjapan Pendidikan Karakter, ISBN:978-979-562-02305.
- Dwiningrum, S.I.A .(2011). "Penguatan Modal Sosial di Sekolah", dipresentasikan Seminar nasional. Tema: " Ilmu Pendidikan: Suatu Kesempatan dan Tantangan", Progam Studi Ilmu Pendidikan Pascasarjan UNY 2011.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Pendidikan Karakter di Sekolah " , dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan dan pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, ISBN: 978-602-9075-63-2 . UKM Makasar.

- Dwiningrum, S.I.A (2011). *School role in disaster mitigation in junior high scholl in Indonesia and Philippines*. Laporan Penelitian Kerjasama Luar Negeri, tidak diterbitkan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwiningrum, S.I.A (2012). Ide Pengembangan Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu Sekolah pasca erupsi merapi, tidak diterbitkan, Laporan Penelitian Mandiri , Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Dwiningrum, S.I.A (2012). Model Sekolah Sadar Bencana. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, BiroAdministrasi Pembangunan Sekretarian DIY.
- Dwiningrum, S.I.A (2013). Nation's Character Based on Social Capital Theory. *Asian Social Science* 2013, ISSN 2012, E-ISSN 1991-2025. Published by Canadian Center of Scince and Education, p 144-155.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Everall, Robin. (2006). Creating a Future: A Study of Resilience in Suicidal Female Adolescent. *Journal of Caunseling & Development*. Vol. 84 hlm. 461-470.
- Field, John (2002). *Modal Sosial*. Medan : Bina Medai Perintis
- Field, John (2005). *Social Capital and Life Long Learning*. Chapter 3.
- Field, John (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacan Offset.
- Fukuyuma, Francis (2002). *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gazalba, Sidi. (1963). *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu: Bentuk-Bentuk Kebudayaan*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

- Giddens, Anthony (1999). *The Third Way*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Glasser, William (1998). *The Quality School*. Harper Parential.
- Grootaert, C. and Thierry van Bastelaer. 2002. *The Role of Social Capital in Developmental - An Empirical Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press. Part 3: The creation and transformation of social capital, terjemahan Dina Swastu Apika
- Grootaert, C., Narayan, D., Jones, Veronica N., dan Woolcock, M. (2004). *World Bank Paper No 18 tentang Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. Washington, DC: The World Bank.
- Garrett, V. (1997) *Managing Change in School leadership for the 21st century* Brett Davies and Linda Ellison, London, Routledge
- Habibuddin. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Sekolah dalam Perspektif Pendidikan Perdamaian. *Disertasi*. Yogyakarta: PPs UNY.
- Henderson, Nan (2003). *Resiliency in School*, California: Corwin Press, Inc.
- Damon, William. (1998). *Handbook of Child Psychology Fifth Edition Volume Four*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Pedoman Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Depdiknas.
- Everall, Robin. (2006). Creating a Future: A Study of Resilience in Suicidal Female Adolescent. *Journal of Counseling & Development*. Vol. 84 hlm. 461-470.

- Esdm. (2007). *Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Diakses dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf> pada tanggal 3 Maret 2012.
- Enrenreich, John (2001). *Coping with Distater ; A Guidebook to Psychosocial Intervention*.
- Goodlad, J. John (1984). *A Placed Called School*. New York. McGraw Hill, Book Company.
- Harris, Alma (2001). *School Improvement*. London: RoutledgeFalmer.
- Harris, Alma (2001). *School Improvement*. London: RoutledgeFalmer.
- Harker, Richard dkk (1990). *Habitus x Modal + Ranah = Praktik*. Yogyakarta: Jalasutera.
- Hasan, S.H. (2010). *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan pengembangan Pusat Kurikulum.
- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Helton, L.R & Smith, M. K. (2004). *Mental Health Practice with Children and Youth*. New York : The Hawort Social Work Practice Press.
- Henderson, Nan (2003). *Resiliency in Schools*. California: Corwin Press, Inc.
- Holiday, Morgot. (1997). Resilience and Severe Burns. *Journal of Counseling and Development*. 75. hlm. 346-357.
- Hauberer, Julia (2011). *Social Capital Theory*. VS Reseach.

- Headington, Rita (2000). *Monitoring, assesment, secording, reporting and scountability, Meeting the Standards*. London: David Fulton Publishers.
- Holaday, Morgot (1997). Resilience and severe burns. *Journal of Counseling and Development*. 75. hlm. 346-357.
- Jack L. Nelson dkk. (1996). *Critical Issues in Education, A Dialectic Approach*. United State: The McGraw-Hill Companies, Inc, hal. 421-427.
- Kande, Fredrick (2008). *Akuntabilitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: UNY
- Kemdiknas. (2000). *Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2004-2005*. Diakses dari [http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/UU%20Nomor%2025%20tahun%202000%20tentang%20PROGRAM%20PEMBANGUNAN%20NASIONAL%20\(PROPENAS\)%20TAHUN%202000-2004.pdf](http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/UU%20Nomor%2025%20tahun%202000%20tentang%20PROGRAM%20PEMBANGUNAN%20NASIONAL%20(PROPENAS)%20TAHUN%202000-2004.pdf). Diunduh pada tanggal 3 Maret 2012.
- Koesoema, D. (2004). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- Kuntoro, SA. (2012). Konsep Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal sebagai Dasar Pembentukan Karakter Bangsa dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan PPs UNM Makassar*, makalah disampaikan pada Seminar nasional Ilmu Pendidikan dengan tema "Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal", tanggal 11 Juli 2012
- LaFramboise, Teresa. D, et.al. (2006). *Family, Community, and School Influences on Resilience among American Indian Adolescents In The Upper Midwest*. 34. 193-209. Diakses dari <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi>. pada tanggal 5 Maret 2012.
- Lexy | Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

- Lickona, Thomas (1991). *Educating for Character: How Our School Can Do Teach Respect and Responsibility*. New York: Brantam Book.
- Lickona, Thomas (1999). Eleven Principles of Effective Character, Scholastic Early Childhood to Day, November/December 1998, 13.1, *PreQuest Education Journals*.
- Lin, Nan (2004). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Australia: Cambrigde University.
- Linggaharja, A. (2012) Kearifan Lokal Modal Membangun Bangsa. <http://alanlinggaharja.blogspot.com/2012/01>. Diunduh tanggal 14 Mei 2014.
- Makmuri, dkk. (2003). *Demokratisasi Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan*, Diknas, 2001.
- Megawangi, R. (2005). *Pendidikan Karakter: Sebuah Agenda Perbaikan Moral Bangsa*. Jakarta: EDUKASI.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng (1993). *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: RekaSarasi.
- Moertimore, P., et al. (1993). *Key Factors for Effective Junior Schooling: Educational Leadership and Management*. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
- Muslich, Masnur (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nelson, Jack L. dkk. (1996). *Critical Issues in Education, A Dialectic Approach*. United State: The McGraw-Hill Companies, Inc, hal. 421-427.

- Newman, F., King, M. Bruce, Rigdon, M. (1997). *Accountability and School Performance*. Harvard Graduate School of Education. Diunduh 10 Januari 2011 dari <http://www.hepg.org/her/Abstract/233>.
- Pemerintah Daerah. (2011). *Surat Keputusan Bupati Sleman No. 253/Kep.DH/A/2011 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar*. Sleman: Pemda.
- Petersen, Amy Cox (2011). *Educational Partnerships*. California: SAGE Publications.
- Priyadi Kardono, dkk. (2009). *Data Bencana Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Putnam, Robert D. (1993.). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*
- Rahardjo, Mudji (2010). *Mengenal Modal Sosial*. Diunduh Jumat 14 Mei 2010, 07:21 <http://www.muhammadrahardjo.com/artikel/204-mengenal-modal-sosial>
- Raka, Gede (2007). Pendidikan Membangun Karakter. *Makalah*, Orasi Perguruan Taman Siswa, Bandung 10 Februari 2007.
- Responsibility, Accountability, and Liability: Studies in the Theory of Responsibility for Engineering Ethics and Engineering Accountability*. Diunduh 1 Februari 2012 dari www.mse.drexel.edu/~theories-of-responsibility.
- Ritzer, George (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reivich, K., & Shatte, A., 1999. *The Resiliency Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable*.
- Reivich, K. & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor*. New York: Broadway Books.
- Piers Blaikie, Ferry C, Ian D, Roulledge; 1994. *AT RISK: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*.

- Rohnke, Karl, 1984. *A Guide To Initiative Problems, Adventure Games, Stunts And Trust Activities*. Kendall/Hunts Publising Company
- Rohman, Arif (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Sarwa Wibawa. (2009). Dampak Penggabungan Sekolah Dasar terhadap Efisiensi, Keefektifan, Produktivitas, dan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samosir, 2003:5
- Sartini (2011). Menggali Kearifan Lokal sebagai Kajian Filsafati. <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/ff/article/viewFile/45/41>. Diunduh tanggal 5 April 2012.
- Sastrapratedja.(2009). *Pendidikan Sebagai Humanisasi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Sastrapratedja.(2012). *Untuk Membangun Humanisme Sebagai Prinsip Pendidikan*. disampaikan dalam Kongres Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, Balai Senat UGM Yogyakarta
- Sastrapratedja (2012). Untuk Membangun Humanisme Sebagai Prinsip Pendidikan. *Makalah*, disampaikan dalam Kongres Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, Balai Senat UGM Yogyakarta.
- School Accountability and Improvement Framework Guidline (2012). Diunduh 2 Januari 2012 dari: <http://www.education.vic.gov.au/management/schoolimprovement/accountability/default.htm>.
- Schuller, Tom (2004). *The Benefits of Learning, The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital, Three Capital, A Framework*. London & New York: Routledge Falmer Taylor & Francis Group.

- Slamet PH. (2005). *Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI.
- Sodiq A Kuntoro (2010). *Kemitraan Sekolah, Artikel "Workshop Strategi Peningkatan Mutu Sekolah"*, Pascasarjana UNY.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarmawan, D. (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan 1*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Sudaryono. (2006). Pendidikan Pasca Gempa. *Makalah, Pelatihan Manajemen Pendidikan dasar*. Yogyakarta: Diknas DIY.
- Suharjo (2014). Peranan Modal Sosial Dalam Perbaikan Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang. *Disertasi*. Progam Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Supratiknya, Agustinus (2014). *Pengukuran Psikologis*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Suyata (2004). *Decentralized Basic Education Project, District Capacity Building*. Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Suyata (2007). *Refleksi Sistem Pendidikan Nasional dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, disampaikan dalam diskusi Pokja Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa tanggal 7-8 Juni 2007 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Suyata (2011). Memanfaatkan dan Mengembangkan Modal Sosial dan Modal Budaya di Sekolah, *Artikel "Workshop Strenght Leadership and Social Capital"* bagi Kepala Sekolah dan Guru di Kotamadya Yogyakarta, Pascasarjana UNY
- Schuller, Tom dkk (2004). *The Benefits of Learning : The Impact of Education on*

- Health, Family life and Social Capital*, London : Routledge Falmer.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera.
- Tilaar, H.A.R (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R (2009). *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Triutomo, Sugeng (2008). *Perencanaan Kontines Menghadapi Bencana*, Badan Penanggulangan Bencana, 2008
- Wahab, S.A (2008). *Analisis kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walle, van de (2004). *Cognition and Learning Background: Rethinking Regrouping*. Diakses dari www.journaleducation.com pada tanggal 26 Maret 2012.
- Wasitohadi (2010). "Refleksi Paradigma Baru Pendidikan: Sistem dan Praksisnya Pasca Reformasi : Kajian Pendidikan Sd Salatiga", *Disertasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UNY.
- Wibowo, A. (2013). *Akuntabilitas Pendidikan*.
- Widlowati, R (2012). *Kebijakan Regrouping dan Resiliensi Sekolah Pasca Erupsi Merapi di SD Negeri Umbulharjo 2. Skripsi*. Progam Studi Kebijakan Pendidikan Jurusan FSP, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.

Woolcock (1998), *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*

Wuryanti, Theresia, *Kerangka Aksi Hyogo : Pengurangan Resiko Bencana 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Desember 2007*

Walle van de. (2004). *Cognition and Learning Background: Rethinking Regrouping*. Diakses dari www.journaleducation.com. pada tanggal 26 Maret 2012.

Wibowo, Agus (2013). *Akuntabilitas Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuwono, Teguh (2003). *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Clogapps Diponegoro University.

Zamroni (2005). *Meningkatkan Mutu Sekolah: Teori, Strategi, dan Prosedur*.

Zamroni (2011). *Pendidikan Multikultural*. Pascasarjana UNY.

Zubaedi (2011). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

www.mse.drexel.edu/.../theories-of-responsibility.

<http://ugm.ac.id/seminar/75-keberlanjutan-pendidikan-anak-pasca-erupsi-merapi.htm>

Sumber:

<http://kepemimpinan-fisipuh.blogspot.com/2009/03/definisi-pemimpin.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

<http://putracenter.blogspot.com/2013/10/definisi-pemimpin-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

<http://kepemimpinan-fisipuh.blogspot.com/2009/03/definisi-kepemimpinan.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK

SITI IRENE ASULI DWININGRUM

Problem pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Kompleksitas persoalan terkait dengan permasalahan yang dihadapi masih terdapat dalam semua level pendidikan yang bersifat kuantitas dan kualitas. Problem atau masalah menjadi masalah pokok di Indonesia, demikian juga masalah pemerataan pendidikan belum tuntas secara nasional. Upaya untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia sudah beragam program. Namun demikian, *education for all* belum terwujud artinya sebelum UUD 1945 belum terwujud pada masyarakat Indonesia sebagai optimal. Problem pendidikan terkait dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kebijakan pendidikan yang dirancang tak lepas dari politik dan kebudayaan sosial budaya masyarakat.

Pengembangan pendidikan membutuhkan paradigma. Paradigma sosial budaya menjadi alternatif baru pengembangan pendidikan di Indonesia. Modal sosial merupakan salah satu cara untuk sosial yang harus dipatuhi keikutsertaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Modal sosial dapat menjadi alternatif baru untuk memantapkan fondasi masyarakat Indonesia yang semakin maju dan *berkeadilan* *ekonomi* dan *keperluan* sosial. Modal sosial yang dibangun secara *spontane* oleh semua komponen dan unsur masyarakat akan memberikan dampak sosial menuju kualitas kehidupan yang lebih baik. Baik bangsa Indonesia khususnya dalam memantapkan berbagai persialan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Modal sosial dalam pengembangan pendidikan di Indonesia masih harus dilatih dalam berbagai *level* yang menghasilkan pengembangan konsep modal sosial yang secara signifikan bersifat kontekstual. Bagi Indonesia ke depannya modal sosial yang semakin meningkat dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus dibangun kembali. dalam hal ini dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk membangun modal sosial yang dibutuhkan bagi peningkatan kualitas pendidikan di semua level pendidikan.



UNY PRESS

Jl. H. A. H. di Gelaran, Gg. Nemanika,
Komplek FT-UNY, Campus Karangmatang, Yogyakarta,
Kode Pos 55261, Telp. (0271) 491349,
unypress.yogyakarta@gmail.com